

*Laporan Hasil Penelitian*

**DINAMIKA GERAKAN ORGANISASI  
AL-ITTIHADYAH DI MEDAN**

Oleh

**Dr. Abdillah, M.Pd**

**Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
IAIN Sumatera Utara Medan**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LP2M)  
IAIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014**

STUDI ORGANISASI  
KEMAHMURAN DI MEDAN

Oleh  
Dr. Abdillah, M.Pd

Program Studi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Fakultas Sastra Universitas Medan



SKRIPSI PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
FAKULTAS SAHTEK

2012

*Laporan Hasil Penelitian*

**DINAMIKA GERAKAN ORGANISASI  
AL-ITTIHADIAH DI MEDAN**

*Dibuatkan Atas Nama*

*DIPA IAIN-SU Tahun 2014*

**Oleh**

**Dr. Abdillah, M.Pd**

**Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

**IAIN Sumatera Utara Medan**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LP2M)  
IAIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014**

Laporan Hasil Penelitian

DINAMIKA GERAKAN ORGANISASI  
AL-ITTIHADYAH DI MEDAN

Oleh

Dr. Abdillah, M.Pd

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
IAIN Sumatera Utara Medan



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LP2M)  
IAIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014

Laporan Hasil Penelitian

DINAMIKA GERAKAN ORGANISASI  
AL-ITTIHADYAH DI MEDAN

Dilaksanakan Atas Biaya

DIPA IAIN-SU Tahun 2014

Oleh

Dr. Abdillah, M.Pd

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

IAIN Sumatera Utara Medan



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LP2M)  
IAIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014

## LEMBAR PENGESAHAN

### LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDU

1. Judul Penelitian : **Dinamika Gerakan Organisasi**

**Al - Ittihadiyah di Medan**

Disiplin Ilmu : Sosiologi Pendidikan

Kategori : Individu

2. Peneliti

a. Nama : Dr. Abdillah, M.Pd

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Pangkat/Gol : Penata (III/C)

d. Jabatan : Lektor

e. Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU

3. Lokasi Penelitian : Kota Medan

4. Jangka Waktu : Juli s/d Desember 2014

5. Biaya Penelitian : Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

6. Sumber Dana : Biaya DIPA IAIN SU tahun 2014

Mengetahui

Medan, November 2014

Ketua LP2M IAIN SU

Peneliti

Prof. Dr. H. Hasyimsyah, Nst M.A

Dr. Abdillah, M.Pd

NIP.19570719 198303 1 005

NIP. 196808051997031002

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDU**

1. Judul Penelitian : **Dinamika Gerakan Organisasi Al-Ittihadiyah di Medan**

2. Disiplin Ilmu : **Sosiologi Pendidikan**

3. Kategori : **Individu**

4. Peneliti : **Dr. Abdillah M.Pd**

5. a. Nama : **Dr. Abdillah M.Pd**

6. b. Jenis Kelamin : **Laki-laki**

7. c. Pangkat/Gol : **Pemata (IIC)**

8. d. Jabatan : **Lektor**

9. e. Fakultas : **Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU**

10. Lokasi Penelitian : **Kota Medan**

11. Jangka Waktu : **Juli s.d Desember 2014**

12. Biaya Penelitian : **Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)**

13. Sumber Dana : **Biaya DIPA IAIN SU tahun 2014**

Medan, November 2014

Mengesahkan

Ketua L.P2M IAIN SU

Prof. Dr. H. Hasmyansyah, Nst M.A.

NIP. 19270719 198303 1 002

Peneliti

Dr. Abdillah, M.Pd

NIP. 196808021997031002

**Abstrak**

Penomena yang menarik pada masa penjajahan belanda adalah bagaimana masyarakat islam melakukan bentuk perlawanan dengan membentuk organisasi islam kemasyarakatan. Organisasi yang dibentuk bermacam-macam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, Al Wasyliyah dan Al-Ittihadiyah.

Dinamika organisasi islam keagamaan ini selalu pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang berkembang. Salah satu organisasi yang menarik untuk dikaji adalah Organisasi Islam Al – Ittihadiyah. Organisasi ini lahir di Medan ketika penjajah Belanda masih berkuasa di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga bergerak di bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk perjuangan dalam memajukan umat Islam.

Penelitian ini difokuskan pada dinamika pelaksanaan pendidikan di kota medan. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan:Perkembangan Organisasi, Pandangan Al-Ittihadiyah dalam pendidikan, Ciri khas dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perkembangan organisasi Al-Ittihadiyah di kota Medan cenderung mengalami tagnan dan kemunduran. Ciri khas pendidikan yang dikelola adalah Madrasah dan Sekolah yang dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah tanpa ada ciri khas. Sdangkan tantangan yang dihadapi adalah kurangnya konsolidasi organisasi sehingga lembaga yang dikelola yayasan dan kepala sekolah berjalan tanpa ada pembinaan, oleh karena itu lembaga yang dikelola seperti milik pribadi dan tidak ada kontribusinya kepada organisasi.

Penelitian yang menarik pada masa penjajahan Belanda adalah bagaimana masyarakat Islam melakukan bentuk perlawanan dengan membentuk organisasi Islam kemasyarakatan. Organisasi yang dibentuk bermacam-macam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al Wasyiyah dan Al-Ittihadiyah.

Dinamika organisasi Islam keagamaan ini selalu pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang berkembang. Salah satu organisasi yang menarik untuk dikaji adalah Organisasi Islam Al-Ittihadiyah. Organisasi ini lahir di Medan ketika penjajah Belanda masih berkuasa di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga bergerak di bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk perlawanan dalam memajukan umat Islam.

Penelitian ini dilakukan pada dinamika pelaksanaan pendidikan di kota Medan. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap perkembangan Organisasi, Pandangan Al-Ittihadiyah dalam pendidikan, Ciri khas dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perkembangan organisasi Al-Ittihadiyah di kota Medan cenderung mengalami stagnan dan kemunduran. Ciri khas pendidikan yang dikelola adalah Madrasah dan Sekolah yang dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah tanpa ada ciri khas. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah kurangnya konsolidasi organisasi sehingga lembaga yang dikelola Yayasan dan kepala sekolah berjalan tanpa ada pembinaan, oleh karena itu lembaga yang dikelola seperti milik pribadi dan tidak ada kontribusinya kepada organisasi.

**Kata Pengantar**

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun judul penelitian ini adalah Dinamika Gerakan Organisasi Al – Ittihadiyah di Medan.

Proses penelitian ini dilaksanakan di organisasi Islam keagamaan dan madrasah/ sekolah yang dikelola oleh AL – Ittihadiyah di kota Medan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pengurus organisasi Al – Ittihadiyah baik pengurus wilayah maupun pengurus cabang yang telah memberikan bantuan demi terlaksananya penelitian ini.

Penulis juga taklupa mengucapkan terimakasih kepada kepala sekolah madrasah/sekolah yang ada di yayasan MAMIYAI yang ada di jalan Bromo Medan dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan.

Ucapan terimakasih juga peneliti tujukan kepada LP2M IAIN SU yang telah membiayai penelitian ini melalui anggaran DIPA IAIN SU tahun 2013. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Medan, November 2014

Peneliti

Dr. Abdillah, M.Pd

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun judul penelitian ini adalah Dinamika Gerakan Organisasi AI - Ithadiyah di Medan. Proses penelitian ini dilaksanakan di organisasi Islam keagamaan dan madrasah sekolah yang dikelola oleh AI - Ithadiyah di kota medan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pengurus organisasi AI - Ithadiyah baik pengurus wilayah maupun pengurus cabang yang telah memberikan bantuan demi terlaksananya penelitian ini. Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada kepala sekolah madrasah/sekolah yang ada di Yayasan MAMMAYAI yang ada di jalan Broomo medan dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan. Ucapan terimakasih juga peneliti tujukan kepada LP2M IAIN SU yang telah membayai penelitian ini melalui anggaran DIPA IAIN SU tahun 2013. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Medan, November 2014

Peneliti

Dr. Abdillah, M.Pd

DAFTAR ISI

- Abstrak..... ii
- Kata Pengantar..... iii
- Daftar Isi..... iv
- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Masalah Pokok... .. 9
- C. Tujuan Penelitian..... 9
- D. Kegunaan Penelitian..... 9
- BAB II KAJIAN TEORI**
- A. Perubahan Sosial..... 11
- B. Agama dan Masyarakat..... 20
- C. Organisasi Kemasyarakatan..... 26
- D. Konflik ..... 31
- E. Kebebasan Beragama ..... 37
- F. Peran Ormas dalam Pendidikan..... 41
- G. Dinamika Perkembangan Organisasi..... 50
- BAB III METODE PENELITIAN**
- A. Gambaran setting dan Sumber Data..... 62
- B. Subjek dan Informan Penelitian..... 62
- C. Tahapan Penelitian..... 63
- D. Teknik Pengumpulan Data..... 64
- E. Teknik Analisis Data..... 66
- F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data..... 66
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

DAFTAR ISI

ii	Abstrak.....
iii	Kata Pengantar.....
iv	Daftar Isi.....
BAB I PENDAHULUAN	
1	A. Latar Belakang Masalah.....
9	B. Masalah Pokok.....
9	C. Tujuan Penelitian.....
9	D. Kegunaan Penelitian.....
BAB II KAJIAN TEORI	
11	A. Perubahan Sosial.....
20	B. Agama dan Masyarakat.....
26	C. Organisasi Kemasyarakatan.....
31	D. Konflik.....
37	E. Kebebasan Beragama.....
41	F. Peran Ormas dalam Pendidikan.....
50	G. Dinamika Perkembangan Organisasi.....
BAB III METODE PENELITIAN	
62	A. Gambaran setting dan Sumber Data.....
62	B. Subjek dan Informan Penelitian.....
63	C. Tahapan Penelitian.....
64	D. Teknik Pengumpulan Data.....
66	E. Teknik Analisis Data.....
66	F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Temuan Umum.....	67
B. Temuan Khusus Dan Pembahasan.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

67	..... A. Temuan Umum
77	..... B. Temuan Khusus Dan Pembahasan
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
82	..... A. Kesimpulan
87	..... B. Saran
88	..... DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan masyarakat peralihan yang mengalami transformasi sosial, politik ekonomi dan budaya yang cepat serta memperoleh pengaruh dari dunia luar secara intens, industrialisasi, urbanisasi, sekulerisasi, polarisasi masyarakat Indonesia yang cenderung menjadi berbagai kelas merupakan proses yang terus berjalan dengan segala macam implikasinya.

Kehidupan manusia yang dinamis akan selalu bergerak dan berkembang, begitu juga dengan pemikiran-pemikiran yang melahirkan perubahan dalam berbagai bidang atau sendi kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, politik, maupun agama sehingga tidak menjadi sesuatu yang aneh atau mengherankan kemunculan para pemikir yang bertujuan untuk berusaha melahirkan situasi baru sebagai bentuk tujuan memperbaharui situasi atau kondisi sebelumnya menjadi lebih baik. Dalam konteks perubahan atau pembaharuan inilah organisasi Islam yang berkembang.

Fenomena menarik antara agama dan masyarakat adalah sifat saling mempengaruhi satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik keagamaan yang berbeda, meskipun mereka menganut agama yang sama. Salah satu faktor penting dalam menentukan karakteristik dari sikap keagamaan menurut beberapa peneliti

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan masyarakat  
perubahan yang mengalami transformasi sosial, politik ekonomi dan  
budaya yang cepat serta memperoleh pengaruh dari dunia luar  
secara intens, industrialisasi, urbanisasi, sekularisasi, polarisasi  
masyarakat Indonesia yang cenderung menjadi berbagai kelas  
merupakan proses yang terus berjalan dengan segala macam  
implikasinya.

Kehidupan manusia yang dinamis akan selalu bergerak dan  
berkembang, begitu juga dengan pemikiran-pemikiran yang  
melibatkan perubahan dalam berbagai bidang atau sendi kehidupan  
manusia, baik di bidang ekonomi, politik maupun agama sehingga  
tidak menjadi sesuatu yang aneh atau mengherankan kemunculan  
para pemikir yang bertujuan untuk berusaha melahirkan situasi  
baru sebagai bentuk tujuan memperbaharui situasi atau kondisi  
sebelumnya menjadi lebih baik. Dalam konteks perubahan atau  
perbaharuan inilah organisasi Islam yang berkembang.

Fenomena menarik antara agama dan masyarakat adalah  
sifat saling mempengaruhi satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari  
kenyataan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki  
karakteristik keagamaan yang berbeda, meskipun mereka menganut  
agama yang sama. Salah satu faktor penting dalam menentukan  
karakteristik dari sikap keagamaan menurut beberapa peneliti

adalah kelas sosial, "kepentingan akan kelas sosial kelihatannya  
teraplikasi bahkan pada kelompok-kelompok agama yang kurang  
terlembaga".<sup>1</sup> Salah satu contoh tentang perbedaan aktivitas antara  
kelas-kelas sosial adalah bahwa masyarakat agraris lebih cenderung  
menganut faham tradisional, sedangkan masyarakat perkotaan dan  
pedagang lebih cenderung menganut faham modern.

Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan suatu gerakan  
keagamaan dalam masyarakat, Scobie menyatakan bahwa salah  
satu kemungkinan kemunculan gerakan keagamaan tersebut adalah  
konflik internal yang muncul dalam satu kelompok agama saat  
sebagian individu dalam kelompok tersebut mencapai suatu status  
sosial, sehingga orang-orang yang tidak mampu atau tidak ingin  
mencapai status tertentu mengadakan pembelotan dan mencoba  
untuk membangun gerakan keagamaan baru.<sup>2</sup> Sementara itu Yinger  
mengetengahkan tiga tipe utama dalam hal ini: Pertama, golongan  
yang secara passive menerima keadaan kekuranganmampuan mereka  
dan menekankan pada pengamalan nilai-nilai keagamaan. Kedua,  
golongan yang mengundurkan diri dari masyarakat, kemudian  
mengkritiknya tapi tidak menyerangnya. Ketiga, golongan yang

<sup>1</sup> Geoffrey E.W. Scobie, *Psychology of Religion*, (London: B.T. Batsford, 1975),  
129.

<sup>2</sup> Ibid hal. 133.

giat dalam menyerang masyarakat, dan menyalahkannya dari sudut nilai-nilai agama.<sup>3</sup>

Fakta yang menarik untuk dikaji bagaimana masyarakat dan agama saling berinteraksi adalah munculnya organisasi-organisasi Islam kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, Alwasliyah dan Al Ittihadiyah. Dua Organisasi terakhir ini lahir di Sumatera utara sementara lainnya didirikan di pulau Jawa. Fakta menarik lainnya adalah organisasi Islam kemasyarakatan tersebut di atas lahir pada masa kolonial Belanda, Muhammadiyah lahir 18 November 1912, Persis lahir 12 September 1923, Nahdatul Ulama (NU) lahir 31 Januari 1926, Al Waslyiah lahir 30 November 1930, dan Ittihadiyah lahir 27 Januari 1935. Berdasarkan fakta ini dapat ditarik benang merah bahwa semangat umat Islam sangat besar dalam membentuk organisasi Islam sebagai wadah menyatukan umat disamping untuk merespon penjajahan yang sudah sangat lama menjajah Indonesia.

Kehadiran Al-Ittihadiyah Sumatera Utara tahun 1935 pada dasarnya merupakan respon umat Islam di wilayah ini terhadap situasi politik dan sosial keagamaan yang berkembang di Indonesia, khususnya Sumatera Timur. Ketika itu, sebagaimana dikemukakan salah seorang mantan ketua umum Pengurus Besar Al-Ittihadiyah, H. Mahmud Abu Bakar dalam Azhar, et al

<sup>3</sup> Lebih lanjut lihat, J.M. Yinger, *Religion, Society and the Individual*, (New York: Macmillan, 1957).

adalah kelas sosial, "kepentingan akan kelas sosial kelihatannya terdistribusi bahkan pada kelompok-kelompok agama yang kurang terintegrasi".<sup>1</sup> Salah satu contoh tentang perbedaan aktivitas antara kelas-kelas sosial adalah bahwa masyarakat agraris lebih cenderung mengutamakan paham tradisional, sedangkan masyarakat perkotaan dan pedesaan lebih cenderung mengutamakan paham modern.

Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan suatu gerakan keagamaan dalam masyarakat, Scobie menyatakan bahwa salah satu kemungkinan kemunculan gerakan keagamaan tersebut adalah konflik internal yang muncul dalam satu kelompok agama saat sebagian individu dalam kelompok tersebut mencapai suatu status sosial, sehingga orang-orang yang tidak mampu atau tidak ingin mencapai status tertentu mengadakan pembelotan dan mencoba untuk membangun gerakan keagamaan baru.<sup>2</sup> Sementara itu Yinger mengemukakan tiga tipe utama dalam hal ini: Pertama, golongan yang secara pasif menerima keadaan kemunduran mereka dan menekankan pada pengamatan nilai-nilai keagamaan. Kedua, golongan yang mengundurkan diri dari masyarakat, kemudian mengkritiknya tapi tidak menyertakannya. Ketiga, golongan yang

<sup>1</sup> Geoffrey E.W. Scobie, *Psychology of Religion* (London: B.T. Batsford, 1975), 129.  
<sup>2</sup> Ibid hal. 133.

(1960:66) bahwa Belanda melancarkan politik pecah belah yang melemahkan kekuatan umat Islam dan menghancurkan potensi alim ulama dikarenakan hendak memperkuat kukunya untuk menjajah Indonesia buat selama-lamanya. Politik adu domba termasuk termakan oleh umat Islam, sehingga muncullah kubu atau kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Pada satu sisi, muncul kaum intelek yang kebarat-baratan yang melontarkan kata-kata yang merendahkan ulama dan umat Islam dengan mengatakan bahwa kaum agama dan alim ulamanya adalah ortodok.

Bakar dalam Azhar, et al (1960:15) menjelaskan sebahagian ulama dan penganut agama Islam menuduh orang intelek sebagai kaki tangan belanda. Pertengkaran antara kedua kelompok ini makin lama kian meruncing. Dalam konteks inilah, Al-Ittihadiyah hadir untuk menjembatani dan mempersatukan umat serta sebagai salan satu barisan jihad bagi kekuatan kaum muslimin (Arsyad, et al, 1968:19).

Al-Ittihadiyah didirikan pada tanggal 27 Januari 1935 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1352 H di Medan oleh Syekh K.H. Ahmad Dahlan, ulama besar pada zamannya yang berasal dari Tanjung Pura Langkat (Anzizhan dan Syafaruddin, 2004:68). Organisasi ini dideklarasikan di gedung Zelfstanding Yong Islamiten Bond Jalan Sisingamangaraja, di belakang masjid Raya Medan. Bersama dengan para ulama, cerdik pandai dan murid-

Ledih lanjut lilac J.M. Yinger. Religion, Society and the Individual. (New York: Macmillan, 1957).

muridnya yang berjumlah 200 orang Syekh K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Al-Ittihadiyah (CVO Conferentie, 1941:27).

Secara historis, kehadiran Al-Ittihadiyah juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Islam yang lebih teratur, lebih modern, dan terorganisir ke dalam suatu organisasi, khususnya sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan Islam yang belum tergabung dalam suatu organisasi tertentu. Dalam lapangan pendidikan Islam, Al-Ittihadiyah melihat bahwa pada era 1930-an, daftar pelajaran perguruan-perguruan Islam di Sumatera Timur masih sangat beragam. Di samping itu, guru-guru yang bertugas pada perguruan-perguruan Islam tersebut juga belum memiliki kesamaan persepsi tentang agama Islam. Karena itu, dalam CVO Conferentie Al-Ittihadiyah (1941:51) dijelaskan bahwa Al-Ittihadiyah didirikan untuk berusaha: (a) mempersatookan daftar peladjaran, dan (b) mempersesoeaikan faham diantara goeroe2 terhadap soal2 jang berhoeboeng dengan agama Islam soemoeanja.

Fakta lain yang dilihat Al-Ittihadiyah adalah kenyataan bahwa dalam pandangan masyarakat sekolah-sekolah modern yang dibangun dan dikembangkan oleh Belanda merupakan jalur terbaik bagi mobilitas sosial secara vertikal. Perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintahan hanya akan menerima dan mempekerjakan para pegawai tamatan dari sekolah-sekolah modern ini. Sementara di sisi lain, madrasah dan perguruan-perguruan

Islam masih terlalu terpaku pada praktik-praktik tradisionalnya dan berorientasi murni keagamaan. Karena itu, satu-satunya lapangan pengabdian yang memungkinkan ditekuni para alumninya hanyalah sebagai ustadz, guru agama, malim kampung, dan guru-guru ngaji.

Ketika Muhammadiyah, organisasi massa Islam terlebih dahulu eksis di Sumatera Timur, membangun sekolah-sekolah modern seperti yang dikembangkan Belanda, maka minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sana demikian besar. Di sinilah tokoh-tokoh Al-Ittihadiyah melihat perlunya mereka berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan Islam modern yang lebih teratur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim. Al-Ittihadiyah sebagai organisasi massa Islam memprogramkan aktivitasnya dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi dengan membangun dan mengembangkan sistem pendidikan madrasah dan sekolah modern, panti asuhan dan majelis simpanan dan pertolongan. Dalam mukhtamar ke-17 Al-Ittihadiyah yang berlangsung tanggal 2 s/d 3 Juli 2004 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, terpilih Brigjend (Purn) Drs. H. Nazri Adlani sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah periode 2004-2009. Pada saat itu Nazri Adlani sebagai ketua MUI, dan Wakil Ketua MPR RI utusan Golongan.

Sejatinya semangat perubahan di DPP Al-Ittihadiyah merupakan jasa tak terlupakan almarhum H. Ali Imran Kadir, SH. Ketika beliau mengamanahkan Sekretaris Jenderal DPP Al-

...mudanya yang berjumlah 200 orang Syekh K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Al-Ittihadiyah (OVO Conference, 1941:27).  
...Secara historis, kehadiran Al-Ittihadiyah juga dilatar-  
...belakangi oleh keinginan untuk menyelenggarakan suatu sistem  
...pendidikan Islam yang lebih teratur, lebih modern, dan terorganisir  
...ke dalam suatu organisasi, khususnya sekolah-sekolah atau  
...perguruan-perguruan Islam yang belum terdapat dalam suatu  
...organisasi tertentu. Dalam lapangan pendidikan Islam, Al-  
...Ittihadiyah melihat bahwa pada era 1930-an, daftar pelajaran  
...perguruan-perguruan Islam di Sumatera Timur masih sangat  
...peragam. Di samping itu, guru-guru yang bertugas pada perguruan-  
...perguruan Islam tersebut juga belum memiliki kesamaan persepsi  
...tentang agama Islam. Karena itu, dalam OVO Conference Al-  
...Ittihadiyah (1941:21) dijelaskan bahwa Al-Ittihadiyah didirikan  
...untuk berusaha: (a) memperstokkan daftar pelajaran, dan (b)  
...mempersosokkan faham diantara gores terhadap soal2 yang  
...berhubungan dengan agama Islam secara umum.  
...Fakta lain yang dilihat Al-Ittihadiyah adalah kenyataan  
...bahwa dalam pandangan masyarakat sekolah-sekolah modern yang  
...dibangun dan dikembangkan oleh Belanda merupakan jalur terbaik  
...bagi mobilitas sosial secara vertikal. Perusahaan-perusahaan dan  
...kantor-kantor pemerintahan hanya akan menerima dan  
...mempertajakan para pegawai tamatan dari sekolah-sekolah modern  
...ini. Sementara di sisi lain, madrasah dan perguruan-perguruan

Ittihadiyah kepada Drs. Anzizhan, MM. tahun 2000, dan pada 2001 datang Drs. Syafaruddin, M.Pd, seorang penulis muda berbakat melanjutkan studinya S3-nya di Jakarta. Mereka aktif membantu kegiatan-kegiatan DPP yang memang lebih banyak kepada taushiah-taushiah kepada pemerintah dan kecamatan terhadap dunia barat yang cenderung tidak adil terhadap dunia Islam. Pemikiran mereka terhadap Al-Ittihadiyah ke depan dituangkan dalam buku "Visi Baru Al-ittihadiyah" yang dengan bangga diluncurkan oleh Ketua MPR RI (Prof.Dr.H. Amien Rais) pada pembukaan Mukhtamar ke-17 tahun 2004. Wujud dari keinginan untuk memajukan Al-Ittihadiyah ke depan maka masuklah ke jajaran pengurus kalangan profesional yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang.

Periode kepengurusan 2004-2009, Brijen (Purn) Drs.H.A.Nazri Adlani selaku Ketua Umum, dibantu oleh beberapa staf ketua, dan sekretaris umum H. Martin Roestamy, SH dan Bendahara Drs.Fikri Boreno, MBA. Kemudian setelah berjalan dua tahun masa bakti, terjadi Resufle kepengurusan pada awal 2005 disebabkan H. Martin Roestamy, SH, MH, terpilih sebagai Rektor Universitas Djuanda Bogor, Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Drs. Anzizhan, MM.

Kemudian baru pada Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-18 tanggal 30 September 2011 di Bogor terpilih Dr. H. Martin Roestamy, SH, MH, menjadi Ketua Umum DPP Al Ittihadiyah

untuk lima tahun ke depan. Di sinilah pentingnya era kebangkitan Al Ittihadiyah untuk menjadi organisasi Islam yang modern.

Saat ini muncul semangat membangkitkan Al- ittihadiyah, dengan memberikan nuansa baru persatuan Islam, dan kebersamaan dalam memajukan pendidikan Islam, dakwah, sosial dan ekonomi umat. Pengembangan wilayah dan cabang memang menjadi perhatian, namun seiring dengan itu pembenahan lembaga pendidikan Al Ittihadiyah sebagai bentuk partisipasi aktif mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu keniscayaan.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian pergerakan keagamaan tidak dapat hanya didasarkan pada keikutsertaan individu dalam suatu kelompok keagamaan. Sebab pergerakan keagamaan merupakan salah satu kasus dari pergerakan sosial dalam berbagai tipe. Di sinilah letak salah satu urgensi penelitian ini yang akan mengeksplorasi dinamika gerakan organisasi Al-Ittihadiyah di Medan sebagai gerakan organisasi Islam kemasyarakatan termuda yang kurang terekspos ditengah masyarakat kota medan dibanding dengan organisasi lain seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Al Wasliyah dan Persis. Atas dasar pemikiran bahwa Al Ittihadiyah berdiri dilatarbelakangi oleh pemahaman sangat pentingnya pendidikan Islam modern yang lebih teratur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim, maka penelitian ini lebih difokuskan pada dinamika gerakan lembaga-lembaga pendidikan Al Ittihadiyah dalam

untuk lima tahun ke depan. Di sinilah pentingnya era kebangkitan Al-Ittihadiyah untuk menjadi organisasi Islam yang modern.

Saat ini muncul semangat membangkitkan Al-Ittihadiyah dengan memberikan nuansa baru persatuan Islam, dan kebersamaan dalam menjalankan pendidikan Islam, dakwah, sosial dan ekonomi umat. Pengembangan wilayah dan cabang memang menjadi perhatian, namun seiring dengan itu pembahasan lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bangsa merupakan suatu keniscayaan.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian pergerakan keagamaan tidak dapat hanya didasarkan pada keikutsertaan individu dalam suatu kelompok keagamaan. Sebab pergerakan keagamaan merupakan salah satu kasus dari pergerakan sosial dalam berbagai tipe. Di sinilah letak salah satu urgensi penelitian ini yang akan mengeksplorasi dinamika gerakan organisasi Al-Ittihadiyah di Medan sebagai gerakan organisasi Islam kemasyarakatan terutama yang kurang terkepos di tengah masyarakat kota medan dibanding dengan organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Wasliyah dan Persis. Atas dasar pemikiran bahwa Al-Ittihadiyah berdiri dilatarbelakangi oleh pemahaman sangat pentingnya pendidikan Islam modern yang lebih teratur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim, maka penelitian ini lebih difokuskan pada dinamika gerakan lembaga-lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah dalam

menyelenggarakan pendidikan Islam modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim di Medan.

## B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk membuat pembahasan dalam tulisan ini lebih terarah kepada permasalahan yang sebenarnya, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan organisasi al-Ittihadiyah di Kota Medan?
2. Bagaimana pandangan Organisasi Al Ittihadiyah tentang pendidikan?
3. Apa Ciri khas lembaga pendidikan Al Ittihadiyah di Medan?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam menyelenggarakan pendidikan di al-Ittihadiyah?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara analitis tentang:

1. Perkembangan organisasi al-Ittihadiyah di Kota Medan.
2. Pandangan Organisasi Al Ittihadiyah tentang pendidikan.
3. Ciri khas lembaga pendidikan Al Ittihadiyah di Medan.
4. Tantangan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam menyelenggarakan pendidikan di al-Ittihadiyah.

## D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi sebagai

menyeleenggarakan pendidikan Islam modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim di Medan.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk membuat pembahasan dalam tulisan ini lebih terarah kepada permasalahan yang sebenarnya, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan organisasi al-Itihadiyah di Kota Medan?
2. Bagaimana pandangan Organisasi Al Itihadiyah tentang pendidikan?
3. Apa Ciri khas lembaga pendidikan Al Itihadiyah di Medan?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam menyelenggarakan pendidikan di al-Itihadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara analitis tentang:

1. Perkembangan organisasi al-Itihadiyah di Kota Medan.
2. Pandangan Organisasi Al Itihadiyah tentang pendidikan.
3. Ciri khas lembaga pendidikan Al Itihadiyah di Medan.
4. Tantangan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam menyelenggarakan pendidikan di al-Itihadiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi sebagai

berikut :

1. Memperkaya khazanah keilmuan dan kajian Islam dalam bidang pendidikan, institusi, dakwah dan kemasyarakatan.
2. Dapat digunakan sebagai model dalam pengembangan pendidikan dan lembaga Islam.
3. Dapat digunakan untuk merumuskan metode, pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga keislaman.

berikut :

1. Mempertkaya kharaznah keilmuan dan kajian Islam dalam bidang pendidikan, instansi, dakwah dan kemasyarakatan.
2. Dapat digunakan sebagai model dalam pengembangan pendidikan dan lembaga Islam.
3. Dapat digunakan untuk merumuskan metode, pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga keislaman.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan sebuah keniscayaan yang berlangsung tidak terbendung dalam kehidupan. Baik perubahan yang cepat maupun lambat. Berbagai factor yang mendasarinya. Beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadi perubahan sosial antara lain sebagai berikut:

#### Teori Evolusi (Evolutionary Theory)

Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini ialah Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi memengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Adapun Tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif, menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Tonnies tidak yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut selalu membawa kemajuan. Dia melihat adanya fragmentasi sosial (perpecahan dalam masyarakat), individu menjadi terasing, dan lemahnya ikatan sosial sebagai akibat langsung dari perubahan sosial budaya ke

A. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan sebuah keniscayaan yang berlangsung tidak terduga dalam kehidupan. Baik perubahan yang cepat maupun lambat. Berbagai factor yang mendasarinya. Beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadi perubahan sosial antara lain sebagai berikut:

Teori Evolusi (Evolutionary Theory)

Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini ialah Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mengartikan cara pengorganisasian masyarakat terutama yang berhubungan dengan kerja. Adapun Tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Tonnies tidak yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut selalu membawa kemajuan. Dia melihat adanya fragmentasi sosial (pepecahan dalam masyarakat), individu menjadi terasing, dan lemahnya ikatan sosial sebagai akibat langsung dari perubahan sosial budaya ke

arah individualisasi dan pencarian kekuasaan. Gejala itu tampak jelas pada masyarakat perkotaan. Teori ini masih belum memuaskan banyak pihak karena tidak mampu menjelaskan jawaban terhadap pertanyaan mengapa masyarakat berubah. Teori ini hanya menjelaskan proses perubahan terjadi.

b. Teori Konflik (Conflict Theory)

Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik atau pertentangan selalu menjadi bagian dari masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik (konflik sosial dan perubahan sosial) selalu melekat dalam struktur masyarakat.

c. Teori Fungsional (Functional Theory)

Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai pada ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Konsep kejutan budaya menurut William F. Ogburn berusaha menjelaskan perubahan sosial dalam kerangka fungsional.

arah individualisasi dan pencarian kekuasaan. Gejala ini tampak jelas pada masyarakat perkotaan. Teori ini masih belum memuaskan banyak pihak karena tidak mampu menjelaskan jawaban terhadap pertanyaan mengapa masyarakat berubah. Teori ini hanya menjelaskan proses perubahan terjadi.

d. Teori Konflik (Conflict Theory)

Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik akan pertentangan selalu menjadi bagian dari masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik (konflik sosial dan perubahan sosial) selalu melekat dalam struktur masyarakat.

e. Teori Fungsional (Functional Theory)

Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai pada ketidaksiapan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Konsep kejutan budaya menurut William F. Ogburn berusaha menjelaskan perubahan sosial dalam kerangka fungsional.

Menurutnya, meskipun unsur-unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya tidak. Ketertinggalan tersebut menjadikan kesenjangan sosial dan budaya di antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur yang berubah lambat. Kesenjangan ini akan menyebabkan adanya kejutan sosial dan budaya pada masyarakat. Ogburn menyebutkan perubahan teknologi biasanya lebih cepat daripada perubahan budaya nonmaterial, seperti kepercayaan, norma, nilai-nilai yang mengatur masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa perubahan teknologi seringkali menghasilkan kejutan budaya yang pada gilirannya akan memunculkan polapola perilaku yang baru meskipun terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional.

d. Teori Siklus (Cyclical Theory)

Teori ini mempunyai perspektif (sudut pandang) yang menarik dalam melihat perubahan sosial karena beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-orang yang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat, terdapat siklus yang harus diikutinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban (budaya) tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan. Oswald Spengler mengemukakan teorinya bahwa setiap masyarakat berkembang melalui empat tahap perkembangan seperti pertumbuhan manusia, yaitu masa kanak-

kanak, remaja, dewasa, dan tua. Ia merasa bahwa masyarakat Barat telah mencapai masa kejayaannya pada masa dewasa, yaitu selama zaman pencerahan (*renaissance*) abad ke-15. Sejak saat itu, peradaban Barat mulai mengalami kemunduran dan menuju ke masa tua. Tidak ada yang dapat menghentikan proses tersebut, seperti yang terjadi pada peradaban Babilonia di Mesir, Yunani, dan Romawi yang terus mengalami kemunduran sampai akhirnya runtuh.

**Faktor Penyebab Perubahan Sosial**

Dewasa ini perubahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Mengapa masyarakat melakukan perubahan? Dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial? Soerjono Soekanto menyebutkan adanya faktor-faktor intern dan ekstern yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.

**1. Faktor Intern**

Ada beberapa faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan.

**a. Perubahan Penduduk**

Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, namun juga bisa karena adanya

Menurutnya, meskipun unsur-unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsur saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya tidak. Ketertinggalan tersebut menjadikan kesenjangan sosial dan budaya di antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur yang berubah lambat. Kesenjangan ini akan menyebabkan adanya ketertinggalan sosial dan budaya pada masyarakat. Ogburn menyebutkan perubahan teknologi biasanya lebih cepat daripada perubahan budaya nonmaterial, seperti kepercayaan, norma, nilai-nilai yang mengatur masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa perubahan teknologi seringkali menghasilkan ketertinggalan budaya yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku yang baru meskipun terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional.

**d. Teori Siklus (Cyclical Theory)**

Teori ini mempunyai perspektif (sudut pandang) yang menarik dalam melihat perubahan sosial karena beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikembalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-orang yang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat, terdapat siklus yang harus dilaluinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban (budaya) tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan. Oswald Spengler mengemukakan teorinya bahwa setiap masyarakat berkembang melalui empat tahap perkembangan seperti pertumbuhan manusia, yaitu masa kanak-

perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Transmigrasi dan urbanisasi dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk daerah yang dituju, serta berkurangnya jumlah penduduk daerah yang ditinggalkan. Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya berbagai profesi dan kelas sosial.

#### b. Penemuan-Penemuan Baru

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat meliputi proses discovery, invention, dan inovasi.

- 1) Discovery, yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur baru itu dapat berupa alat-alat baru ataupun ideide baru.
- 2) Invention, yaitu bentuk pengembangan dari suatu discovery, sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru ini dalam kehidupan nyata di masyarakat.
- 3) Inovasi

atau proses pembaruan, yaitu proses panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru serta jalannya unsur baru dari diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh sebagian besar warga masyarakat. Suatu penemuan baru, baik kebudayaan rohaniah (imaterial) maupun jasmaniah (material) mempunyai pengaruh bermacam-macam.

Biasanya pengaruh itu mempunyai pola sebagai berikut.

1) Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang tertentu, namun akibatnya memancar ke bidang lainnya.

Contohnya penemuan handphone yang menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, dan lain-lain.

2) Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan yang menjalar dari satu lembaga ke lembaga yang lain.

Contohnya penemuan internet yang membawa akibat pada perubahan terhadap pengetahuan, pola pikir, dan tindakan masyarakat.

3) Beberapa jenis penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan.

Contohnya penemuan internet, e-mail, televisi, dan radio menyebabkan perubahan pada bidang informasi dan komunikasi.

4) Penemuan baru dalam hal kebudayaan rohaniah (ideologi, kepercayaan, sistem hukum, dan sebagainya) berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan, adat istiadat, maupun pola perilaku sosial.

Contohnya pemahaman dan kesadaran akan nasionalisme oleh orang-orang Indonesia yang belajar di luar negeri pada awal abad ke-20, mendorong lahirnya gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan politik dan lembaga-lembaga sosial baru yang bersifat nasional. Seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, Al-Wasliyah dan Al - Ittihadiyah.

c. Konflik dalam Masyarakat

Suatu konflik yang kemudian disadari dapat memecahkan ikatan sosial biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial tersebut. Apabila demikian, maka biasanya terbentuk keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelum terjadi konflik. Contohnya konflik antarteman di sekolah. Konflik dapat merubah kepribadian orang-orang yang terlibat di dalamnya, misalnya jadi murung, pendiam, tidak mau bergaul, dan lain-lain. Namun apabila orang-orang yang terlibat konflik sadar akan hal itu, maka mereka akan berusaha untuk memperbaiki keadaan itu agar lebih baik dari sebelumnya.

d. Pemberontakan (Revolusi) dalam Tubuh Masyarakat  
Revolusi di Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengubah struktur

4) Pencapaian baru dalam hal kebudayaan rohaniyah (ideologi, kepercayaan, sistem hukum, dan sebagainya) berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan, adat istiadat, maupun pola perilaku sosial.

Contohnya pemahaman dan kesadaran akan nasionalisme oleh orang-orang Indonesia yang belajar di luar negeri pada awal abad ke-20, mendorong lahirnya gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan politik dan lembaga-lembaga sosial baru yang bersifat nasional. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Washliyah dan AI - Iktidadiyah.

Konflik dalam Masyarakat  
Suatu konflik yang kemudian disadari dapat memecahkan ikatan sosial biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial tersebut. Apabila demikian, maka biasanya terbentuk keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelum terjadi konflik. Contohnya konflik antarman di sekolah. Konflik dapat merubah kepribadian orang-orang yang terlibat di dalamnya, misalnya jadi matang, pendiam, tidak mau bergaul, dan lain-lain. Namun apabila orang-orang yang terlibat konflik sadar akan hal ini, maka mereka akan berusaha untuk memperbaiki keadaan itu agar lebih baik dari sebelumnya.

1. Pembertonntakan (Revolusi) dalam Tubuh Masyarakat  
Revolusi di Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengubah struktur

pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Hal itu diikuti dengan berbagai perubahan mulai dari lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya.

### 2. Faktor Ekstern

Dengan melakukan interaksi sosial, banyak pengaruh-pengaruh dari luar masyarakat kita yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor ekstern yang menyebabkan perubahan sosial adalah sebagai berikut.

#### a. Faktor Alam yang Ada di Sekitar Masyarakat Berubah

Bagi manusia, alam mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupannya. Misalnya alam mempunyai nilai estetika yang mendorong manusia untuk cinta pada alam, alam sebagai sumber penyediaan bahan-bahan makanan dan pakaian, serta alam menjadi sumber kesehatan, keindahan, dan hiburan atau rekreasi.

Mengingat pentingnya alam bagi kehidupan manusia, maka sudah seharusnya kita menjalin keserasian hubungan dengan alam yang ada di sekitar kita agar tetap terjaga kelestariannya. Namun apa yang terjadi? Tidak jarang tindakan manusia justru mengakibatkan munculnya kerusakan alam. Misalnya tindakan manusia menebang hutan secara liar. Tindakan tersebut dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor pada musim penghujan karena terjadinya pengikisan tanah oleh air hujan (erosi). Akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan sarana umum lainnya.

Hal ini menjadi pemerintahan nasional. Hal ini diikuti dengan berbagai perubahan mulai dari lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya.

## 2. Faktor Ekstern

Dengan melakukan interaksi sosial, banyak pengaruh-pengaruh dari luar masyarakat kita yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor ekstern yang menyebabkan perubahan sosial adalah sebagai berikut.

a. Faktor Alam yang Ada di Sekitar Masyarakat Berubah Bagi manusia, alam mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupannya. Misalnya alam mempunyai nilai estetika yang mendorong manusia untuk cinta pada alam, alam sebagai sumber perveediaan bahan-bahan makanan dan pakaian, serta alam menjadi sumber kesehatan, keindahan, dan hiburan atau rekreasi.

Mengingat pentingnya alam bagi kehidupan manusia, maka sudah seharusnya kita menjalin keserasian hubungan dengan alam yang ada di sekitar kita agar tetap terjaga kelestariannya. Namun apa yang terjadi? Tidak jarang tindakan manusia justru mengakibatkan munculnya kerusakan alam. Misalnya tindakan manusia menebang hutan secara liar. Tindakan tersebut dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor pada musim penghujan karena terjadinya pengikisan tanah oleh air hujan (erosi). Akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan sarana umum lainnya.

## b. Peperangan

Peperangan yang terjadi antara negara yang satu dengan negara yang lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar, baik seluruh wujud budaya (sistem budaya, sistem sosial, dan unsur-unsur budaya fisik) maupun seluruh unsur budaya (sistem pengetahuan, teknologi, ekonomi, bahasa, kesenian, sistem religi, dan kemasyarakatan). Perubahan-perubahan itu umumnya terjadi pada negara yang kalah perang karena biasanya negara yang menang cenderung untuk memaksakan nilai-nilai, budaya, cara-cara, dan lembaga kemasyarakatannya kepada negara tersebut.

## c. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Terjadinya pengaruh kebudayaan masyarakat lain adalah sebagai berikut.

- 1) Apabila terjadi hubungan primer, maka akan terjadi pengaruh timbal balik. Di samping dipengaruhi, suatu masyarakat akan memengaruhi masyarakat lain.
- 2) Apabila kontak kebudayaan terjadi melalui sarana komunikasi massa seperti radio, televisi, majalah atau surat kabar. Dalam hal ini pengaruh kebudayaan hanya terjadi sepihak, yaitu pengaruh dari masyarakat yang menguasai sarana komunikasi massa tersebut.
- 3) Apabila dua masyarakat yang mengalami kontak kebudayaan mempunyai taraf kebudayaan yang sama,

terkadang yang terjadi justru cultural animosity, yaitu keadaan di mana dua masyarakat yang meskipun berkebudayaan berbeda dan saling hidup berdampingan itu saling menolak pengaruh kebudayaan satu terhadap yang lain. Biasanya terjadi antara dua masyarakat yang pada masa lalunya mempunyai konflik fisik ataupun nonfisik.

- 4) Apabila dua kebudayaan bertemu salah satunya mempunyai taraf yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah proses imitasi (peniruan) unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang telah maju oleh kebudayaan yang masih rendah.

## B. Agama dan Masyarakat

Membicarakan aktifitas suatu lembaga agama tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas keagamaan lembaga tersebut maupun aktifitas keagamaan individu yang berada di dalamnya. Secara psikologis aktifitas atau tingkah laku seseorang merupakan refleksi faktor-faktor psikologis yang mendasarinya. Dengan demikian aktifitas keagamaan seseorang juga dipengaruhi oleh proses yang dialaminya dalam memeluk suatu agama. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang beragama.<sup>4</sup>

1. Karena faktor sosial, misalnya karena didikan orang tua, tradisi sosial, tekanan dari lingkungan sosial.

<sup>4</sup> Robert H. Thoules, *An Introduction to Psychology of Religion*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 15-19.

2. Karena pengalaman dan kebutuhan:

- a. Alam, misalnya karena terinspirasi dari berbagai peristiwa alam atau keharmonisan alam.
- b. Moral, misalnya karena konflik moral yang terjadi di dalam diri. Hal ini dapat menjadikan dualisme dalam sikap dan tingkah laku seseorang.
- c. Perasaan, misalnya pengalaman batin yang langsung berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan.

3. Karena ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehingga menimbulkan rasa kebutuhan akan kepuasan melalui jalan agama.

4. Karena alasan-alasan ilmiah.

Dalam kehidupan seseorang agama bukanlah hal yang diterima begitu saja, ia tumbuh dan berkembang sejak masa kanak-kanak. Bahkan banyak hal dalam keberagamaan seseorang merupakan hasil konvensi sosial dari masyarakat tempat ia hidup. Dalam kenyataannya penanaman ide-ide keagamaan dilakukan dengan pengajaran dan pendidikan lebih dahulu dan seiring dengan perkembangan jiwa seseorang barulah kemudian argumen rasional tentang kebenaran suatu agama muncul.

Dari sisi psikologis, kajian tentang transmisi nilai-nilai keagamaan dan juga aktifitas-aktifitas keagamaan yang dilakukan

Tentang peranan agama dalam kehidupan individu lihat: Robert A. Hinde dan David Byrne, *Social Psychology: Understanding Human Interaction*, Edisi VI, Boston: Allyn and Bacon, 1991.

terkadang yang terjadi justru cultural animosity yaitu keadaan di mana dua masyarakat yang meskipun berkembangnya berbeda dan saling hidup berdampingan itu saling menolak pengaruh kebudayaan satu terhadap yang lain. Biasanya terjadi antara dua masyarakat yang pada masa lalu mempunyai konflik fisik ataupun nonfisik.

4) Apabila dua kebudayaan bertemu salah satunya mempunyai taraf yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah proses imitasi (peniruan) unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang telah maju oleh kebudayaan yang masih rendah.

### B. Agama dan Masyarakat

Membicarakan aktifitas suatu lembaga agama tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas keagamaan lembaga tersebut maupun aktifitas keagamaan individu yang berada di dalamnya. Secara psikologis aktifitas atau tingkah laku seseorang merupakan refleksi faktor-faktor psikologis yang mendasarinya. Dengan demikian aktifitas keagamaan seseorang juga dipengaruhi oleh proses yang dilaluinya dalam memeluk suatu agama. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang beragama.

1. Karena faktor sosial, misalnya karena didikan orang tua, tradisi sosial, tekanan dari lingkungan sosial.

Robert H. Thoules, *An Introduction to Psychology of Religion* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 12-19.

oleh seseorang atau suatu lembaga tidak dapat dilepaskan dari peranan sugesti<sup>5</sup> yang biasanya berbentuk:

1. Penguatan yang berulang-ulang.
2. Peningkatan daya sugesti dengan menaikkan wibawa atau martabat pemuka agama (misalnya dengan memakai pakaian khusus), dapat juga ditingkatkan dengan menyediakan situasi sosial tertentu (misalnya dengan mengumpulkan sejumlah orang untuk melakukan ritual-ritual tertentu).

Faktor lain yang berkaitan dengan aktifitas individu dalam kelompok keagamaan adalah keterikatannya dengan lembaga tersebut secara fisis dan psikis. Keterikatan seseorang dengan kelompok atau lembaga keagamaan dapat dibagi atas dua macam. Pertama ikatan terhadap kelompok merupakan keterikatan secara fisik dan berlangsung sementara waktu. Kedua kelompok yang tidak membutuhkan keterikatan fisik tapi tetap terikat secara psikis. Namun keduanya memiliki pengaruh yang sama, yakni mampu mensugesti dan membuat anggotanya menganut suatu kepercayaan dan dan berperilaku sesuai dengan visi, misi, ciri khas dan tuntutan kelompok. Namun hasil akhirnya tidaklah sama, dengan kata lain, dari sisi anggota proses ini menghasilkan salah satu dari dua kategori berikut ini.

<sup>5</sup> Tentang peranan sugesti dalam merubah tingkah laku lihat: Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Social Psychology: Understanding Human Interaction*, Edisi VI, Boston: Allyn and Bacon, 1991.

- Anggota memulai suatu kehidupan yang baru dengan orientasi hidup yang baru, efek ini akan membentuk suatu kebiasaan baru juga.<sup>6</sup>
- Anggota hanya melakukan ritual karena sentuhan emosi, efek ini tidak akan bertahan lama atau dengan kata lain akan memudar.

Dalam hal pengaruh sosial dan lembaga terhadap aktifitas dan perilaku keagamaan seseorang ada beberapa aspek penting yang patut diperhatikan.

#### 1. Penyesuaian diri.

Penyesuaian diri terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok (tertulis maupun tidak) merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan, sebab norma-norma tersebut yang menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku sehingga tanpa penyesuaian tersebut kelompok akan hidup dalam kekacauan sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah:

- Penyatuan diri, yakni perbedaan daya tarik terhadap kelompok atau individu tertentu yang disebabkan karena perasaan menyatu atau menyukai sumber pembawa pengaruh. Dari berbagai kajian dinyatakan bahwa terdapat

<sup>6</sup> Kadang-kadang untuk sampai taraf ini pemuka agama mengeksplorasi rasa takut (misalnya takut akan neraka), hal-hal yang menjijikkan (misalnya sifat-sifat orang munafiq dan kafir), atau mengeksplorasi hal-hal yang menggembirakan (misalnya surga dan kesucian).

korelasi positif antara tingkat penyatuan diri ini dengan tingkat penyesuaian diri.

b. Ukuran kelompok, yakni besar-kecilnya kelompok yang membawa pengaruh. Hal ini disebabkan karena semakin besar kelompok maka semakin besar pula tingkat kolusinya dan apa bila kelompok yang mayoritas telah menyetujui sesuatu maka yang lain akan merasa tidak nyaman apabila ia melawan arus.

c. Dukungan dari orang lain. Hal yang patut diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa dukungan yang berasal dari orang yang tidak berkompeten dalam situasi tertentu dan dari orang yang berbeda pendapat dengan anggota lain dalam suatu kelompok justru akan menyulitkan proses penyesuaian diri.

d. Perbedaan gender. Walaupun isu-isu kesetaraan gender semakin berkembang akhir-akhir ini namun dalam beberapa kelompok masyarakat tetap ada perbedaan dalam tingkat penyesuaian diri.

2. Kesiediaan diri, yakni kesiediaan diri seseorang untuk merubah berbagai aspek tingkahlakunya agar sesuai dengan tujuan kelompok. Beberapa prosedur yang sukses digunakan dalam hal ini antara lain:

3. Kepatuhan terhadap aturan-aturan kelompok. Proses pembentukan kepatuhan ini antara lain:

• Anggota memulai suatu kehidupan yang baru dengan orientasi hidup yang baru, etek ini akan membentuk suatu kebiasaan baru juga.

• Anggota hanya melakukan ritual karena sentuhan emosi, etek ini tidak akan bertahan lama atau dengan kata lain akan memudar.

Dalam hal pengaruh sosial dan tempa terhadap aktifitas

dan perilaku keagamaan seseorang ada beberapa aspek penting

yang patut diperhatikan.

Penyesuaian diri.

Penyesuaian diri terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok (terulis maupun tidak) merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan, sebab norma-norma tersebut yang menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku sehingga tanpa penyesuaian tersebut kelompok akan hidup dalam kekecewaan sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah:

a. Penyesuaian diri, yakni perbedaan daya tarik terhadap kelompok atau individu tertentu yang disebabkan karena perasaan menyetau atau menyukai sumber pembawa pengaruh. Dari berbagai kajian dinyatakan bahwa terdapat

yang-ladang untuk sampai taraf ini pemuka agama mengeksplorasi rasa takut (misalnya takut akan neraka), hal-hal yang menjijikkan (misalnya nilai-nilai orang munafik dan kafir), atau mengeksplorasi hal-hal yang menggembirakan (misalnya surga dan kesucian).

korlasi positif antara tingkat penyatuan diri ini dengan tingkat penyesuaian diri.

d. Ukuran kelompok, yakni besar-kecilnya kelompok yang membawa pengaruh. Hal ini disebabkan karena semakin besar kelompok maka semakin besar pula tingkat kolusinya dan apa bila kelompok yang mayoritas telah menyetujui sesuatu maka yang lain akan merasa tidak nyaman apabila ia melawan arus.

e. Dukungan dari orang lain. Hal yang patut diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa dukungan yang berasal dari orang yang tidak berkompeten dalam situasi tertentu dan dari orang yang berbeda pendapat dengan anggota lain dalam suatu kelompok justru akan menyulitkan proses penyesuaian diri.

d. Perbedaan gender. Walaupun isu-isu kesetaraan gender semakin berkembang akhir-akhir ini namun dalam beberapa kelompok masyarakat tetap ada perbedaan dalam tingkat penyesuaian diri.

Kesediaan diri, yakni kesediaan diri seseorang untuk merubah berbagai aspek tingkah lakunya agar sesuai dengan tujuan kelompok. Beberapa prosedur yang sukses digunakan dalam hal ini antara lain:

Kepatuhan terhadap aturan-aturan kelompok. Proses pembentukan kepatuhan ini antara lain:

- a. Dalam berbagai situasi pimpinan menawarkan kebebasan pada orang-orang yang memikul tanggung jawab untuk aktifitas mereka.
- b. Pimpinan biasanya memiliki atribut atau hal-hal lain yang menunjukkan kekuasaan mereka.
- c. Pada berbagai situasi orang-orang yang menjadi sasaran dipengaruhi secara perlahan yang akhirnya mampu melahirkan kepatuhan yang luar biasa hingga sang target mampu melawan sifat alamiahnya.

Namun kepatuhan yang ditunjukkan seseorang terhadap suatu kelompok tidak selalu bertahan selamanya, kepatuhan-kepatuhan tersebut dapat memudar bahkan menghilang apabila salah satu atau seluruh hal-hal berikut dialami individu dalam kelompok, yaitu:

- a. Individu menyadari bahwa pimpinan kelompok keagamaan bukan lah orang-orang yang berwenang dalam bidang keagamaan.
- b. Terjadi perubahan negatif pada pandangan individu tentang tokoh idola dan teladan dalam kelompok sehingga ia tidak lagi mematuhi idola atau teladannya.
- c. Dalam diri individu berkembang pertanyaan-pertanyaan sekitar motivasi dan legalitas pemimpin atau pemuka agama dalam kelompok.

Bila penyesuaian diri, kesediaan diri, dan kepatuhan individu dalam kelompok telah memudar atau runtuh akan

mengakibatkan frekwensi aktifitas individu dalam kegiatan kelompok keagamaan akan berkurang atau bahkan tidak melakukannya lagi.

### C. Organisasi Kemasyarakatan

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia<sup>7</sup>. Menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Melihat perkembangan selanjutnya bahwa agama yang resmi diakui oleh pemerintah hanya ada lima, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan tidak ada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya mengakui lima agama yang diakui oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya mengakui lima agama yang diakui oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya mengakui lima agama yang diakui oleh pemerintah.

<sup>7</sup>Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

umat islam misalnya yang paling populer dan menjadi *mainstream* adalah Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama), disamping itu terdapat organisasi dan sekaligus gerakan islam lainnya. Masing-masing gerakan islam tersebut memiliki berbagai aliran dan memegang teguh prinsip aliranyang di anggapnya benar.

#### Organisasi sosial keagamaan dan lembaga

keagamaan adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi, fungsi dan agama; yang dulunya diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1985, namun beberapa kontroversi dan realitas mengenai organisasi kemasyarakatan di lapangan pemerintah menganggap Undang-undang ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masa sekarang. Setelah terjadi perdebatan dan pertimbangan maka sesuai dengan bunyi Pasal 87, undang-undang tersebut mulai berlakusejak diundangkanyakni 22 Juli 2013. maka Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tidak berlakulagi.<sup>8</sup>

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintah - han membawa paradigma baru dalam tata kelola

<sup>8</sup> Anonim, UU Ormas Disahkan Organisasi Pelaku Kekerasan Bis Disanksi. <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/25/UU-Ormas-Disahkan-Organisasi-Pelaku-Kekerasan-bisa-Disanksi>. Diakses tanggal 10 November 2014

organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga Negara, baik secara individu maupun kolektif, termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kotamadya sesuai dengan keberadaannya yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun jenis dan dasar pembentukan organisasi kemasyarakatannya yaitu:<sup>9</sup>

### 1. Jenis dan Cara Pembentukan

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 14

organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Oleh karena itu, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, termasuk Ormas wajib menjalankan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan beragama, tetap menghargai dan menghormati kepribadian Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula Ormas yang menjabarkan Pancasila sebagai

Untuk lebih terperinci dalam melaksanakan tugasnya organisasi kemasyarakatan harus memperhatikan dan mengembangkan perannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun jenis dan cara pembentukan organisasi kemasyarakatan:

#### 1. Jenis dan Cara Pembentukan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 14

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>10</sup>

#### 2. Asas dan Tujuan

Organisasi kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan dengan mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

#### 3. Tujuan dan Fungsi Ormas. Ormas bertujuan untuk:<sup>12</sup>

- a) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral,

<sup>10</sup> *Ibid*, pasal 18

<sup>11</sup> *Ibid*, pasal 3

<sup>12</sup> *Ibid*, pasal 4

etika, dan budayayanghidupdalam masyarakat.e)Melestarikansumber daya alam danlingkungan hidup.f) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong,dan toleransidalamkehidupanbermasyarakat.g)Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuanbangsa.h)Mewujudkan tujuannegara.

Organisasikemasyarakatanberfungsi sebagai:<sup>13</sup>

- 1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- 2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuanorganisasi
- 3) Penyalur aspirasimasyarakat
- 4) Pemberdayaanmasyarakat
- 5) Pemenuhanpelayanansosial
- 6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuatpersatuan dankesatuanbangsa
- 7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,danbernegara.

#### D. Konflik

<sup>13</sup>Ibid,pasal6

Konflik adalah unsur

terpenting dalam kehidupan manusia. Menurut George Simmel karena konflik memiliki fungsi positif. Sedangkan menurut Karl Marx bahwa "konflik menjadi dinamika sejarah". Selain itu Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa konflik "Menjadi entitas hubungan sosial". Lanjut Max Weber "dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia". pengertian konflik tersebut menekankan bahwa manusia adalah makhluk konflik (*homo conflictus*) yaitu makhluk yang selalut terlibat dalam perbedaan, pertentangan, persaingan baik sukarela maupun terpaksa.<sup>14</sup>

Jika memahami konflik pada dimensi sekarang ini, maka unsur-unsur yang ada dalam konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat di dalamnya. artinya dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor. Menurut Novri Susan mengemukakan bahwa konflik biasa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan Negara (*vertical conflict*), konflik antar

<sup>14</sup>Novri Susan., *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 4.



menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Berger tentang timbulnya suatu konflik<sup>18</sup>, yaitu:

1. Alat untuk memelihara solidaritas.
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lainnya.
3. Mengaktifkan peranan individu yang semulanya terisolasi.
4. Konflik berfungsi sebagai komunikasi.

Konflik yang merupakan kondisi dalam perubahan sosial. Maka konflik dapat ditelaah dari pelbagai aspek, sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Secara historis, maka konflik antara masyarakat-masyarakat memainkan suatu peranan penting dalam pembentukan unit-unit sosial yang lebih besar dan lebih luas, memperkuat sistem stratifikasi sosial dan memperluas difusi penemuan-penemuan baru di bidang sosial budaya. Di dalam zaman modern, konflik internasional telah mempengaruhi struktur ekonomi dan politik dari pelbagai masyarakat, kebijakan-kebijaksanaan politik,

<sup>17</sup>Novri Susan, *op. cit.*, h. 1.

<sup>18</sup>Yesmil Anwardan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, Hal. 207.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, h. 26

maupun norma-norma, walaupun perhatian terhadap masalah-masalah itu tidak banyak.

2. Konflik antar golongan mungkin mendorong

terjadinya perubahan dan penemuan-penemuan baru.

3. Adanya atau kemungkinan terjadinya konflik antar generasi.

Adapun perspektif konstruksi konflik yang dikembangkan secara khusus oleh seorang sosiologi

perdamaian yaitu John Paul Lederach<sup>20</sup> yaitu:

1.

Konflik sosial dipahami sebagai hal yang dialami, suatu pengalaman-man-pengalaman umum yang hadir di setiap hubungan dan budaya.

2. Konflik dipahami sebagai kejadian konstruktif kebudayaan secara sosial.

Konflik tidak hanyaterjadipadaseseorang, tetapi orang merupakan peserta aktif dalam menciptakan situasi dan interaksi yang mereka ambil pengalamannya sebagai konflik.

3. Konflik muncul melalui proses interaktif yang melandaskan pada pencarian dan penciptaan makna bersama.

<sup>20</sup> Ibid. Hal. 67-68.

4. Proses interaktif disempurnakan melalui diadakannya dalam perspsi manusia, interpretasi, ekspresi, dan niatan-niatan, yang semuanya tumbuh dan berputar kembali ke keadaan umum mereka (*common sense*).
5. Pemaknaan muncul sebagaimana manusia meletakkan diri mereka sendiri dan sesuatu yang sosial seperti situasi, kejadian, dan tindakan di dalam pengetahuan terkumpul mereka.
6. Kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama dan kemas-kema dan digunakan oleh sekelompok orang untuk merasakan, menafsirkan, mengekspresikan, dan merespons kenyataan sosial disekitar mereka.
7. Pemahaman hubungan konflik sosial dan budaya tidak hanya satu pertanyaan sensitif dari kesadaran, tetapi lebih jauh petualangan yang dalam dari penemuan dan penggalian arkeologis dari pengetahuan umum bersama di sekelompok orang.

Untuk mengetahui konflik lebih mendalam maka dapat dibedakan jenis dan tipe konflik itu sendiri, yaitu:

Pertama, dimensi vertikal atau "konflik atas" yang dimaksud dengan konflik ini adalah antara elit dan massa (rakyat). Elit di sini bisa para pembuat kebijakan di tingkat pusat (pemerintahan), bisa pula kelompok bisnis atau aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakannya instrumen kekerasan Negara, sehingga timbul korban di kalangan massa (rakyat).

Kedua, konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) itu sendiri seperti konflik antar agama, khususnya antar kelompok agama Islam dan kelompok agama non Islam (protestan dan katolik) selain itu konflik antar suku.<sup>21</sup>

Selain jenis konflik, ada pula pembagian dalam tipe konflik yang memberikan gambaran tentang sikap, prilaku, dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik dipermukaan oleh Fisher, adapun penjelasannya yaitu:<sup>22</sup>

#### 1) Tanpa Konflik

Menggambarkan situasi yang relative stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti dalam masyarakat, akan tetapi ada

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 92

<sup>22</sup> Novri Susan, *op. cit.*, h. 92-93.

beberapa kemungkinan atas situasi ini. Pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah kearah konflik kekerasan. Kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhkan permusuhan dan kekerasan.

2) Konflik laten

Yaitu suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa di tangani.

3) Konflik terbuka

Dimana situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakardalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasinya karpenyebab dan berbagai efeknya.

4) Konflik dipermukaan

Memiliki akaryang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karenakesalahpahaman mengenisasaran, yang dapat di atasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).

E. Kebebasan Beragama

Berkaitan dengan masalah agama dan beragama, setiap individu

mencerminkandirisebagaimahlukotonom.Beragama  
 sebagaimasalah pilihan  
 jalanhidup,baikmenentukanberadadiatasrelkebaikanmaupun  
 keburukan,bukansecara otomatisdantakenfor  
 grantedterjadi.Halini merupakan dimensietikarasional,  
 untukapasebuahkeputusan dipilih.

Mempertimbangkan otonomi dan kebebasan manusia dalam membawaarahkehidupannyasecaraindividual, Allah menyatakanjaminan atas kebebasan memilih beragama atau tidak beragama. Dalamsebuah ayat dinyatakan:

“sesungguhnya kami telah memberimanusiasuatu jalan,ia dapat memilih berimanmaupunkufur”(Q.S.al-insan 76:3).

Ayatini menjelaskan bahwaAllahmemberi duamacampetunjuk kepada jalan lurus dan kesesatan atau kebaikan dan keburukan.manusia denganotonomiakalnyadiperkenankanuntukmemilih.Jikaia menghendakiuntukberimandanberagama, makaiaakan memilihberagadandanberiman (*shaakir*).Sebaliknyajikaia menghendaki untuktidakberiman atautidak beragama,,makajadilahiatidakberimandan beragama<sup>23</sup>.

<sup>23</sup>ZakiyuddinBaidhawi.,*KredoKebebasanBergama*. Jakarta:PSAP,2006,hal.37-38.

Dalam konsep Negara pancasila mengenai kebebasan beragama, dapat diuraikan secara hirarkis sebagai berikut<sup>24</sup>:

### 1. Sila pertama pancasila

Sebagai dasar pertama, ketuhanan yang mahaesa bukan saja meletakkan dasar moral di atas kesatuan nasional yang berasaskan keagamaan. Pengakuan sila pertama (ketuhanan yang maha esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena agama adalah salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi kehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation-building*.

### 2. Pasal 28 dan 29 UUD 1945

Dalam amandemen undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 Em erumuskan bahwa:

- 1) Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan memeluk kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

<sup>24</sup>Mirza Nasution dan Iman Pasu Purba., *Jaminan Kehidupan Beragama dalam Konstitusi*, Jakarta: Sofmedia, 2013, hal. 68.

Pasal 29 ayat(2) menentukan bahwaNegaramenjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masingdanmenurutagamanyaandankepercayaanya itu.

### 3. UU no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 22 ayat(1) setiap orang bebas memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaannyaitu.

Pasal 22 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadatmenurutagamanya dankepercayaannyaitu.

### 4. UU no 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik:

Yaitu pada Pasal 18 ayat(1) setiap orang berhak atas kebebasanberpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Ayat(2) tidak seorang pun boleh dipaksasehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

(3) kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain. (4) Negara-negara pihak pada konvensi ini berjanji untuk menghormati kebebasan orangtua, jika ada wali, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

#### F. Peran Ormas Dalam Pendidikan

Di Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintah dibuat dari, oleh, dan untuk rakyat. Kebijakan-kebijaksanaan negaranya, termasuk kebijakan pendidikannya, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di Negara tersebut, juga berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan tersebut secara konkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di bidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, justru memperkuat pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana formal.

Pembangunan yang dilakukan oleh Negara termasuk salah satu wujud dari implementasi kebijaksanaan yang diformulasikan. Bentuk pembangunan tersebut tidak hanya masalah fisik dan mental, melainkan juga sekaligus pembangunan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, dengan demikian termasuk bagian atau objek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat juga dipandang sebagai modal dasar pembangunan, yang jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijaksanaan - kebijaksanaan Negara, termasuk kebijaksanaan pendidikannya, adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan, tidak saja sekadar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahnya, melainkan yang juga tak kalah penting adalah sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikan<sup>25</sup>.

Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem

<sup>25</sup> Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Hal. 79-80

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Peran serta masyarakat / partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan . selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 BAB III pasal 4 peran serta / partisipasi masyarakat dapat berbentuk:

- a) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
- b) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- c) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
- d) Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;

- e) Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
- f) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- g) Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- h) Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
- i) Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
- j) Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- k) Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- l) Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Partisipasi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan mutu. Partisipasi merupakan proses eksternalisasi individu, sebagaimana dijelaskan oleh Berger, bahwa eksternalisasi adalah suatu pencurahan kehadiran manusia secara terus

menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mental. Pada proses eksternalisasi menurut Berger, adalah suatu keharusan karena manusia pada praktiknya tidak bisa berhenti dari proses pencurahan diri ke dalam dunia yang ditempatinya. Manusia akan bergerak keluar mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Partisipasi sebagai proses interaksi social ditentukan oleh objektifitas yang ditentukan oleh individu dalam dunia intersubjektif yang dapat dibedakan oleh kondisi sosiokultural sekolah.

Bagi sekolah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah kenyataan objektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subjektif orang tua siswa. Dengan demikian, partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau objektivasi dari sekolah dan orang tua dalam tujuan sekolah. Artinya, tidak cukup dipahami oleh sekolah bahwa partisipasi sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubjektif (siswa, orang tua, dan guru) menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu<sup>26</sup>. Tujuan partisipasi juga memberi peluang secara luas peran masyarakat dalam

<sup>26</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Hal. 192-199.

bidang pendidikan ini sekaligus menunjukkan bahwa Negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan<sup>27</sup>.

### Bentuk-bentuk Peran Masyarakat dalam Pendidikan.

Desentralisasi pendidikan memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini tujuan partisipasi sebagai upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan cukup variatif. Bentuk partisipatif yaitu dalam Manajemen Berbasis Sekolah, partisipasi orang tua dalam program mutu, komite sekolah, pembiayaan sekolah, mengatasi problem anak, partisipasi dalam disiplin sekolah, partisipasi edukatif dalam perspektif siswa dan partisipasi guru dalam resiliensi sekolah. Bentuk-bentuk partisipasi yang terjadi pada satuan pendidikan dan masalah yang dihadapi oleh sekolah yang secara umum dideskripsikan sebagai berikut:

#### Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk	Aktivitas	Masalah
Partisipasi dalam MBS	Pihak masyarakat bermusyawarah dengan sekolah.  Pemerintah menyediakan sarana-	Berdasarkan tanggap partisipasi belum semua sekolah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat pada

<sup>27</sup> Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal.118.

yang pendidikan ini sekaligus menunjukkan bahwa Negara  
satu-satunya penyelenggara pendidikan.

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pendidikan.

Desentralisasi pendidikan memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini tujuan partisipasi sebagai upaya meningkatkan mutu pada satuan pendidikan cukup variatif. Bentuk partisipasi yaitu dalam Manajemen Berbasis Sekolah. Partisipasi orang tua dalam program mutu, komite sekolah, pelayanan sekolah, mengatasi problem anak, partisipasi dalam disiplin sekolah, partisipasi edukatif dalam perspektif dan partisipasi guru dalam teslensi sekolah. Bentuk partisipasi yang terjadi pada satuan pendidikan dan sekolah yang dihadapi oleh sekolah yang secara umum deskripsikan sebagai berikut:

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Masalah	Aktivitas	Bentuk Partisipasi
Berdasarkan tangga partisipasi belum semua sekolah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat pada	Pihak masyarakat bermusyawarah dengan sekolah.	Partisipasi dalam
	Pemerintah menyediakan sarana-	pendidikan

Chen dan Tait. Sam. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.18.

	<p>prasarana sekolah.</p> <p>Komite sekolah berpartisipasi aktif.</p> <p>Pemanfaatan potensi yang ada</p> <p>Masyarakat memiliki gotong royong</p>	<p>tangga yang tertinggi</p>
<p>Partisipasi masyarakat dalam pendidikan</p>	<p>Kesiapan SDM secara profesional.</p> <p>Stakeholder mendukung program sekolah.</p> <p>Menghadiri pertemuan sekolah untuk mengetahui perkembangan siswa.</p> <p>Membantu murid belajar</p> <p>Mencari sumber-sumber lain/pendukung untuk memecahkan masalah pendidikan</p>	<p>Belum semua masyarakat, khususnya orang tua pada sekolah menyadari bahwa untuk terlibat aktif dalam pembangunan pendidikan.</p>

**Hambatan Dalam Mengikut Sertakan Masyarakat Dalam Pendidikan.**

Deskripsi diatas memberikan gambaran yang lebih empirik bahwa masyarakat pada dasarnya cenderung

<p>yang tinggi</p>	<p>prasarana sekolah. <b>Komite sekolah</b> partisipasi aktif</p> <p>Pemantauan potensi yang ada</p> <p>Masyarakat memiliki gotong royong</p>	
<p>Belum masyarakat khususnya orang tua pada sekolah menyadari bahwa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan pendidikan.</p>	<p>Kesiapan SDM secara profesional.</p> <p>Stakeholder mendukung program sekolah.</p> <p>Menghadiri pertemuan sekolah untuk mengetahui perkembangan siswa.</p> <p>Membantu murid belajar</p> <p>Mencari sumber-sumber lain/pendukung untuk memecahkan masalah pendidikan</p>	<p>partisipasi masyarakat dalam pendidikan</p>

berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi disisi lain tidak mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Hambatan yang dialami oleh sekolah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan membuktikan, belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. Realitas tersebut menguatkan asumsi sepenuhnya bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena ada hambatan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat.

Dari pihak pemerintah, kendala yang muncul dapat berupa:

1. Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik.
2. Lemahnya dukungan SDM yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan public.
3. Rendahnya kemampuan lembaga legislative dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat.
4. Lemahnya dukungan anggaran, karena kegiatan partisipasi public sering kali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah tidak menjalankan dana secara berkelanjutan.

Sedangkan pihak masyarakat, kendala partisipasi muncul karena beberapa hal, antara lain:

... Dalam Mengikut Sertakan Masyarakat Dalam ...  
... Diatas memberikan gambaran yang lebih ...  
... masyarakat pada dasarnya cenderung ...

partisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi disisi lain tidak mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Hambatan yang dialami oleh sekolah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan pendidikan, belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. Realitas tersebut mengunkan asumsi bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena hambatan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat.

Dari pihak pemerintah, kendala yang muncul dapat berupa: kurangnya komitmen politik para pengambil keputusan diarah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik.

Kurangnya dukungan SDM yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan public.

Kurangnya kemampuan lembaga legislative dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat.

Kurangnya dukungan anggaran, karena kegiatan partisipasi public sering kali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah tidak menjalankan dana secara berkelanjutan.

Sedangkan pihak masyarakat, kendala partisipasi muncul karena beberapa hal, antara lain:

1. Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka.
2. Apatisme karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah.
3. Tidak adanya *trust* masyarakat kepada pemerintah<sup>28</sup>.

#### G. Upaya Meningkatkan Masyarakat Dalam Kebijakan Pendidikan.

Pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan haruslah senantiasa berusaha agar kebijaksanaan yang digulirkan melibatkan sebangay mungkin partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaannya. Inilah perlunya upaya dan rekayasa.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menawarkan sanksi atas masyarakat yang tidak mau berpartisipasi. Sanksi demikian dapat berupa hukuman, denda, dan kerugian-kerugian yang harus diderita oleh si pelanggar.
2. Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi. Hadiah yang demikian berdasarkan kuantitas dan tingkatan atau derajat partisipasinya.
3. Melakukan persuasi kepada masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilalaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

<sup>28</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan....., hal.1947-198.

4. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
5. Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
6. Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan, agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplementasikan.
7. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memang perlu diyakini, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan.
8. Menyadari masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah tersebut, adalah salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat<sup>29</sup>.

#### H. Dinamika Perkembangan Organisasi

Al-Ittihadiyah didirikan tanggal 27 Januari 1935 atau bertepatan dengan 21 Syawal 1353 Hijriah. Organisasi Islam ini dideklarasikan di gedung *Zelfstanding Yong Islamiten Bond* Jalan Sisingamangaraja, belakang Masjid Raya Medan. Ketika itu, bersama-sama dengan para ulama, cerdik pandai, dan murid-

<sup>29</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia.....*, hal. 82.

muridnya yang berjumlah 200 orang, Sjech Hadji Ahmad Dahlan meresmikan berdirinya Al-Ittihadiyah.<sup>30</sup>

Secara formal, maksud didirikannya Al-Ittihadiyah adalah untuk:

- a. Mempertegoeh perhoeboengan silatoerahmi sesama oemat Islam.
- b. Mengoesahkan berdirinja roemah-roemah pergoeroean Islam.
- c. Mengatoer dan mensesoeaikan daftar peladjaran dalam roemah-roemah pergoeroean A.I. dan roemah-roemah perogeroean jang bergaboeng dengan A.I.
- d. Memperloeas sji'ar dan propaganda Islam, dengan djalan melangsoengkan tabligh-tabligh, memperingati dengan oepatjara jang sepatoetnja hari-hari peringatan dalam agama Islam.
- e. Dan lain-lain oesaha jang haroes dan halal.<sup>31</sup>

Dalam anggaran dasar Al-Ittihadiyah pada pasal 2 dinyatakan bahwa organisasi ini berdasarkan Islam dan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kemudian dalam pasal 3 diterakan pula bahwa Al-Ittihadiyah bertujuan untuk:

<sup>30</sup> Lihat C.V.O. Conferentie, *ibid.*, h. 27 dan Muchlis Arsjad et. al., *op. cit.*, h. 18.

<sup>31</sup> Bachroem Azhar et. al., *Peringatan Ulang Tahun ¼ Abad al-Ittihadiyah*, (Medan: Panitia Besar Kongres ke X al-Ittihadiyah, 1960), h. 15.

1. Mewujudkan tercapainya kualitas umat Islam yang maju dan mandiri serta dapat mengamalkan ajaran Islam *li-I'la kalimatillah*.
2. Terwujudnya cita-cita Islam dalam masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai idiologi negara menuju masyarakat madani yang diridhoi Allah SWT.<sup>32</sup>

Pendiri Al-Ittihadiyah adalah Sjech Hadji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Menurut Fuad Said, Ahmad Dahlan adalah seorang etnis Melayu. Pendidikan awalnya beliau terima dan dalam dari madrasah Mahmudiyah di kabupaten Langkat. Setelah itu, beliau kemudian bertahun-tahun bermukim dan menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sekembalinya ke tanah air, beliau menekuni profesi sebagai guru agama sehingga menjadi salah seorang ulama terkemuka di masanya. Ketika studi di Al-Azha, Sjech Hadji Ahmad Dahlan berkenalan dengan seorang wanita Mesir yang bernama Hj. Ummi Hanim Ali, yang kemudian dipersunting menjadi isteri beliau. Dama sejarah Al-Ittihadiyah Hj. Ummi Hanim Ali juga merupakan tokoh yang turut berjasa, tidak saja dalam memberikan dukungan moril, tetapi juga materil seperti menyumbangkan uang dan emas

<sup>32</sup> Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah, *Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Ittihadiyah* (Jakarta: Sekretariat DPP dan PP Muslimat Al-Ittihadiyah, 1999), h. 68.

milik pribadinya untuk mendukung pendirian dan kontinuitas Al-Ittihadiyah.<sup>33</sup>

Berbeda dengan kebanyakan organisasi Islam yang ada di tanah air, tidak lama setelah mendirikan Al-Ittihadiyah, Sjech Hadji Ahmad Dahlan dan isterinya hijrah ke luar Sumatera Timur dan meninggalkan organisasi yang baru dibangun atau didirikannya. Tidak diketahui dengan pasti apa latar belakang hijrahnya pendiri organisasi ini. Dalam laporan pengurus Al-Ittihadiyah pada mukhtamarnya yang pertama, tahun 1941, hanya dinyatakan sebagai berikut: *Toean H. A. Dahlan alm – sebagai ketoea oemoem – berhoeboengan dengan beberapa hal dan keadaan, meninggalkan Soematra Timoer.*<sup>34</sup> Peristiwa kepindahan ini merupakan tantangan berat pertama yang dihadapi Al-Ittihadiyah dalam melangsungkan keberadaannya. Namun tantangan ini berhasil dihadapi oleh para tokoh pediri lainnya dengan terus mengembangkan Al-Ittihadiyah ke berbagai daerah di Sumatera Utara.

Ketika pertama sekali didirikan, komposisi Pengurus Besar Al-Ittihadiyah terdiri atas:

Ketua Umum : Syech Hadji Ahmad Dahlan

Ketua Muda I : Lasimoen

<sup>33</sup>K. H. A. Fuad Said, "Sejarah Singkat al-Ittihadiyah dan Sambutan yang Disampaikan dalam Acara Pembukaan Mukhtamar ke XVI dan HUT ke 64" dalam *Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga al-Ittihadiyah*, (Jakarta: sekretariat DPP al-Ittihadiyah, 1999). h. 56.

<sup>34</sup> Lihat dalam C.V.O. Conferentie, *op. cit.*, h. 31.

Ketua Muda II	:Mohammad Nazir Nasution
Djoeroesoerta I/Sekretaris	:Abdul Hamid Toeloes
Djoeroesurat I	:M. M. Syarif Siregar
Bendahara	:O.K. Amran, Hadji Azhari, Tasman, Mohammad Ali, Abdul Hamid, dan Ismail
Penasehat	:Sjech Hasan bin Ma'some dan Sjech Abdullah Afifuddin
Ketua Kehormatan	:Tengku Otteeman Sani Perkasa Alamsjah dan Sultan Sulaiman <sup>35</sup>

Ketika pertama sekali didirikan, untuk mempermudah penyelenggaraan aktivitas organisasi, Al-Ittihadiyah membentuk majelis-majelis yang terdiri dari:

1. Madjelis Organisatie dan Djoeroe Pereksa yang dipimpin oleh Abdul Hamid Toeloes dan Sjarif Siregar.
2. Madjelis Secretarie dan Penjiaran Oemoem.
3. Madjelis Tarbijah.
4. Madjelis Tabligh.
5. Madjelis Fatwa.
6. Madjelis Pers dan Propagnada<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Lihat C.V.O. Conferentie, *ibid.*, h. 28, Muchlis Arsjad et. al., *op.cit.*, h 18, dan Fuad Said, *ibid.*, h. 56.

<sup>36</sup> C.V.O. Conferentie, *op. cit.*, h. 22.

Selain majelis di atas, Al-Ittihadiyah juga membentuk badan-badan otonom organisasi, seperti Persatuan Pemuda Al-Ittihadiyah (PPAI) dan Persatuan Puteri Al-Ittihadiyah (PERPAI). Kedua badan otonom ini memiliki peran besar dalam menghidupkan dan menjamin kontinuitas organisasi.

Pada masa Orde Lama, badan-badan otonom dalam Al-Ittihadiyah berjumlah sembilan, yaitu:

1. Persatuan Putri Al-Ittihadiyah (PERPAI).
2. Gerakan Pemuda Al-Ittihadiyah (GERPAI).
3. Angkatan Putri Al-Ittihadiyah.
4. Kepanduan Al Muhadjirin.
5. Majelis Anak Miskin dan Yatim Al-Ittihadiyah (MAMIYAI).
6. Zending Islam Al-Ittihadiyah
7. Majelis Pendidikan Pengajaran Al-Ittihadiyah.
8. Majelis Tabligh Al-Ittihadiyah<sup>37</sup>

Pada masa Orde Baru, jumlah badan otonom itu bertambah satu lagi sehingga seluruhnya berjumlah sepuluh, yaitu:

1. Persatuan Puteri (Muslimat) Al-Ittihadiyah.

<sup>37</sup> Bachroem Azhar, *op. cit.*, h. 16.

2. Gerakan Pemuda Al-Ittihadiyah (GERPAI).
3. Angkatan Putri Al-Ittihadiyah.
4. Panti Asuhan Anak Yatim MAMIAI Al-Ittihadiyah.
5. Majelis Zending Islam Al-Ittihadiyah.
6. Majelis Pendidikan/Pengajaran dan Kebudayaan Al-Ittihadiyah.
7. Majelis Tabligh dan Da'wah Al-Ittihadiyah.
8. Majelis Fatwa Al-Ittihadiyah.
9. Majelis Ekonomi Al-Ittihadiyah.<sup>38</sup>

#### **Peran al-Ittihadiyah dalam Bidang Pendidikan**

Menurut K.H. Sajuhti Noor, salah seorang tokoh ulama Al-Ittihadiyah, tujuan pendidikan Islam yang digagas Al-Ittihadiyah adalah:

- a) Menciptakan putra/I muslim agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia dan akhirat.
- b) Bertujuan 'ubudiyah', yakni agar putra/I muslim memperhambakan dirinya kepada Allah swt.
- c) Menjadikan putra/I muslim dan menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Muchlis Arsjad et. al., *op. cit.*, h. 20.

Berdasarkan tujuan di atas, maka dalam persepektif Al-Ittihadiyah, pendidikan Islam harus mempersatukan tiga aspek utama yang disebut sebagai tiga serangkai, yaitu ilmu, iman, dan amal guna membentuk manusia agar menjadi umat yang berilmu, beriman, dan beramal yang dihiasi dengan akhlak budi pekerti yang luhur.<sup>40</sup>

Untuk mencapai hal tersebut, Al-Ittihadiyah menerapkan dwi sistem dalam pelaksanaan pendidikannya dengan membangun dan mengembangkan sekaligus sistem pendidikan madrasah dan persekolahan. Untuk mengorganisir dan memajukan kedua siste kelembagaan pendidikan tersebut, Al-Ittihadiyah membentuk badan otonom yang disebut Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihadiyah.

Usaha Al-Ittihadiyah dalam pendidikan tidak hanya terfokus pada usaha pendirian sekolah atau madrasah, tetapi juga menggabungkan sekolah atau madrasah yang belum masuk ke dalam satu organisasi Islam ke dalam Al-Ittihadiyah. Sejak berdiri sampai tahun 1940, Al-Ittihadiyah telah berhasil menggabungkan enam madrasah ke dalam organisasinya, yaitu:

- 1) Madrasah Al-Islamijay Saintisweg.
- 2) Madrasah Al-Intisjariah Soengei Kerahstrast.

<sup>39</sup> K.H. Sajuhti Noor, 'Dakwah dan Pendidikan Islam' dalam *Buku Mukhamar Al-Ittihadiyah ke XII* (Badung: Seksi Publikasi Panitia Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-13, 1968), h. 52-53.

<sup>40</sup> K.H. Sajuhti Noor, *ibid.*, h. 53.

- 3) Madrasah Al-Hoedadinijah Gloegoer.
- 4) Madrasah Daoedijah Jalan Antara.
- 5) Madrasah Al-Sjarifijah Sidodad, dan
- 6) Madrasah Al-Alijah Pertjoetweg.<sup>41</sup>

Tokoh ulama Al-Ittihadiyah yang besar juga jasanya di bidang pendidikan adalah KH. Ahmad Sanusi. Pemikiran-pemikiran ajengan Ahmad Sanusi dituangkannya dalam berbagai karya, seperti Raudhatul Irfan, kitab terjemah bahasa Sunda perkata dan dilengkapi dengan tafsir penjelas secara ringkas. Tafsir ini telah dicetak ulang berpuluh kali dan sampai sekarang masih dipakai oleh majlis-majlis ta'lim di wilayah Jawa Barat. Karya lainnya adalah serial Tamsyiyatul Muslimin, tafsir al-Qur'an dalam bahasa Melayu (Indonesia). Setiap ayat-ayat al-Qur'an disamping ditulis dengan huruf Arab juga ditulis (transliterasi) dalam huruf Latin. Sementara banyak ulama pada waktu itu memandang usaha KH. Ahmad Sanusi sebagai suatu bid'ah yang haram, sehingga menimbulkan perdebatan yang sengit. Serial tafsir ini, sarat dengan pesan-pesan tentang pentingnya harga diri, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan di kalangan umat. Kitab lain yang juga ditulis adalah Malja al-Talibin fi Tafsir Kalam Tabb al-Alamin, dan Raudah al-'Irfan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Lihat CVO Conferentie, *ibid.* h. 52.

<sup>42</sup> Irfan Safrudin (et al), *Ulama-ulama Perintis*, (Bandung: MUI, 2008), hlm.

- 3) Madrasah Al-Hoedabiniyah Gloeger.
- 4) Madrasah Daedjiah Jalan Antara.
- 5) Madrasah Al-Sjarifiah Sidodad, dan
- 6) Madrasah Al-Ajiah Perjoetweg.<sup>41</sup>

Tokoh ulama Al-Ittihadiah yang besar juga jasanya di bidang pendidikan adalah KH. Ahmad Sanusi. Pemikiran-pemikiran ajegan Ahmad Sanusi dituangkannya dalam berbagai karya, seperti *Raudhatul Irfan*, kitab terjemah bahasa Sunda per-kata dan dilengkapi dengan tafsir per-jelas secara ringkas. Tafsir ini telah dicetak ulang berturut-turut kali dan sampai sekarang masih dipakai oleh majlis-majlis ta'lim di wilayah Jawa Barat. Karya lainnya adalah serial *Tamsiyatul Muslimin*, tafsir al-Qur'an dalam bahasa Melayu (Indonesia). Serial ayat-ayat al-Qur'an disamping ditulis dengan huruf Arab juga ditulis (tersebut) dalam huruf Latin. Sementara banyak ulama pada waktu itu memandang usaha KH. Ahmad Sanusi sebagai suatu bid'ah yang haram, sehingga menimbulkan perdebatan yang sengit. Serial tafsir ini sarat dengan pesan-pesan tentang pentingnya harga diri, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan di kalangan umat. Kitab lain yang juga ditulis adalah *Majma' al-Talibin fi Tafsir Kalam Tabb al-Alamin* dan *Raudah al-Irfan*.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Lihat CVO Conferentie, ibid. h. 52.  
<sup>42</sup> Lihat Raudah al-Irfan, ibid. h. 52.

Pemikiran Ahmad Sanusi dalam bidang pendidikan dapat diketahui melalui upaya-upaya yang dilakukannya sebagai berikut:

**1. Upaya Memajukan Pendidikan**

Salah satu upaya untuk memajukan bidang pendidikan, Ahmad Sanusi membentuk lembaga pendidikan Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah. Di lembaga ini diajarkan selain pengetahuan agama, juga pengetahuan umum yang berdasarkan ajaran Islam. Untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan para kyai, Ahmad Sanusi menyelenggarakan kursus-kursus kepemimpinan, politik dan mengaktifkan pengajian mingguan sebagai sarana pengkajian dan pendalaman ilmu-ilmu agama.

Untuk meningkatkan para kyai dan masyarakat luas dalam bidang pemahaman alqur'an, maka pada bula oktober 1932, ia menerbitkan *Tamsiyatul Muslimin* yang merupakan kitab tafsir pertama kali di sukabumi, kitab ini ditulis dalam dua bahaa arab dan latin. Karena penulisan tafsir ini merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat sukabumi, bahkan di Jawa Barat, aka penerbitannya tidak luput dari kecaman dan tantangan.

**2. Sistem, Metode dan Kurikulum Pendidikan**

Pondok Pesantren "Syamsul Ulum" yang dibangun oleh Ahmad Sanusi merupakan sarana untuk mereflesikan konsep pendidikan keagamaan yang dirancangnya. Salah satu sistem pendidikan yang baru dan pertama kali diperkenalkan di daerah Sukabumi adalah sistem klasikal.

Jenjang pendidikan yang harus ditempuh di perguruan ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu tingkat rendah, menengah dan tingkat tinggi. Masing-masing tingkat terdiri dari empat kelas yaitu kelas satu sampai kelas empat dengan masa belajar empat tahun.<sup>43</sup>

Dilihat dari kiprahnya yang memang berbasis pendidikan pesantren selama bersama ayahnya, demikian juga setelah kepulangannya dari Makkah. Pada tahun 1915 beliau kembali mengajar di pesantren ayahnya selama kurang lebih 3 tahun.

Pendidikan dalam artian satu kegiatan yang diharapkan akan menjadi basis perubahan secara khusus menjadi perhatian yang sangat serius oleh Ahmad Sanusi. Pendidikan yang dimaksud adalah cita-cita untuk membentengi aqidah umat dan melahirkan pendidikan yang membebaskan. Karena disatu sisi ia menyaksikan pendidikan Islam (pesantren) tertinggal jauh oleh pendidikan yang diselenggarakan oleh misionaris Kristen, sedangkan disisi yang lain pendidikan Islam (non formal) yang ada waktu itu adalah penghulu yang menjadi ajang kepanjangan tangan pemerintah colonial.

Karya-karya beliau yaitu *Pertama*, dalam bidang tafsir seperti, *Raudhlatul Irfan fi Ma'rifat Alqur'an*, *Maljau Al-Thalibin*, *Ushul Al-Islam fi Tafsir Kalam al-Muluk al-'Alam fi Tafsir Surah Al-Fatihah* dll. *Kedua*, dalam bidang fiqih, seperti, *al-Jauhar al-Mardhiyah fi Mukhtar al-Furu' as-Syafi'iyah*, *at-Tanbih al-Mahir*

<sup>43</sup> Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 169

fi al-Mukhalith wa al-Mujawir, dll. Ketiga, dalam bidang Ilmu Kalam, seperti, Haliyat al-'Aql wa al-Fikr fi Bayan Muqtadiyahatas-Syirk wa al-Fikr, Miftah al-Jannah fi Bayan Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah, dll. Keempat, dalam bidang Tasawuf, seperti, Siraj al-Afkar, Dalil as-Sairin, At-Tamsiyah al-Islam fi Manaqib al-Aimmah, dll.

A. Gambaran setting dan sumber data

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Medan tempat dimana pertama kali organisasi ini berdiri. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Ibtidaiyah Kota Medan serta tempat-tempat lain sekitar Medan sebagai kebutuhan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk metode penelitian adalah tentang pendekatan yang menekankan pada wawancara mendalam dan metode lain yang diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan valid dengan informasi serta waktu dan biaya penelitian di Medan.

B. Subjek dan Instrumen Penelitian

Subjek penelitian ini adalah organisasi Islam Komunitas Al-Ibtidaiyah Medan. Dengan teknik purposive sampling dan Snowball sampling, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pimpinan unsur pimpinan anggota Komunitas Al-Ibtidaiyah Medan dengan kriteria berikut:

lejang pendidikan yang harus ditempuh di perguruan ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu tingkat rendah, menengah dan tingkat tinggi. Masing-masing tingkat terdiri dari empat kelas yaitu kelas satu sampai kelas empat dengan masa belajar empat tahun.<sup>43</sup> Difihat dari kiperanya yang memang berbasis pendidikan pesantren selama bersama ayahnya, demikian juga setelah

keputusannya dari Makkah. Pada tahun 1912 beliau kembali mengajar di pesantren ayahnya selama kurang lebih 3 tahun.

Pendidikan dalam artian satu kegiatan yang diharapkan akan menjadi basis perubahan secara khusus menjadi perhatian yang sangat serius oleh Ahmad Sanusi. Pendidikan yang dimaksud adalah cita-cita untuk membentengi adalah umat dan melahirkan pendidikan yang membebaskan. Karena disatu sisi ia menyaksikan pendidikan Islam (pesantren) tertinggal jauh oleh pendidikan yang diselenggarakan oleh misionaris Kristen, sedangkan disisi yang lain pendidikan Islam (non formal) yang ada waktu itu adalah penghulu yang menjadi ajang kepanjangan tangan pemerintah colonial.

Karya-karya beliau yaitu Pertama, dalam bidang tafsir seperti, Rauhul Iqan fi Ma'rifat al-Qur'an al-Majid al-Mahid, Usul al-Islam fi Tafsir Kalam al-Muluk al-'Alam fi Tafsir Surah al-Fatihah dll. Kedua, dalam bidang fiqh, seperti, al-Jawhar al-Mardiyyah fi Mukhtar al-Furu' as-Syafi'iyah, al-Tamhid al-Mahir

Abidin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Jogjakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 109

fi al-Mukhalafah wa al-Mujawib, dll. Ketika dalam bidang ilmu  
 Kalam, seperti, Haqiqat al-'Aql wa al-Fikr fi Bayan Muqadimat  
 'Ishiq wa al-Fikr, Miftah al-Jannah fi Bayan Ahl az-Sunnah wa al-  
 Jamaah, dll. Kemudian dalam bidang Tasawuf, seperti, Siraj al-  
 Aql, Dalil as-Salihin, At-Tanzih al-Islam fi Manahil al-  
 Ibtisam, dll.

### BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan alasan bahwa dengan menggunakan penelitian ini maka peristiwa dan alurnya dapat diikuti dan difahami secara kronologis, kemudian sebab dan akibat suatu peristiwa dapat dinilai dan dijelaskan dalam lingkup pikiran subjek penelitian, dan yang paling penting adalah bahwa data-data dapat diperoleh dan dijelaskan dengan kaya dan bermanfaat.

#### A. Gambaran setting dan Sumber Data

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Medan tempat dimana pertama kali organisasi ittihadiah ini berditri. Penelitian ini akan difokuskan di kantor Ittihadiyah Kota Medan serta tempat-tempat lain sekitar medan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Sedangkan entri dan kehadiran peneliti adalah tentang pendekatan yang dilakukan peneliti dalam memasuki wilayah objek penelitian, usaha menjalin kedekatan dan keakraban dengan informan serta waktu dan lamanya penelitian dilakukan.

#### B. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah organisasi Islam Kemasyarakatan Al-Ittihadiyah Medan. Dengan teknik *purposive sampling* dan *Snowball sampling*, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pimpinan, unsur pimpinandan anggota organisasi al-Ittihadiyah Medan dengan kriteria berikut :

## BAB III

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan alasan bahwa dengan menggunakan penelitian ini maka peristiwa dan alur dapat diikuti dan dipahami secara kronologis, kemudian sebab dan akibat suatu peristiwa dapat dinilai dan dijelaskan dalam lingkup pikiran subjek penelitian, dan yang paling penting adalah bahwa data-data dapat diperoleh dan dijelaskan dengan kaya dan bermakna.

## A. Gambaran setting dan Sumber Data

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Medan tempat dimana pertama kali organisasi ittihadiah ini berdiri. Penelitian ini akan difokuskan di kantor Ittihadiah Kota Medan serta tempat-tempat lain sekitar medan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Sedangkan entri dan kehadiran peneliti adalah tentang pendekatan yang dilakukan peneliti dalam memasuki wilayah objek penelitian, usaha menjalin kedekatan dan keakraban dengan informan serta waktu dan lamanya penelitian dilakukan.

## B. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah organisasi Islam Kemasyarakatan Al-Ittihadiah Medan. Dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pimpinan, unsur pimpinan dan anggota organisasi Al-Ittihadiah Medan dengan kriteria berikut :

1. Keterlibatan informan dalam al-Ittihadiah di Medan lebih dari setahun.
2. Telah mengikuti lebih dari tiga kegiatan yang berkaitan dengan dinamika al-Ittihadiah di Medan.
3. Profesi atau pekerjaan yang ditekuni berbeda dari setiap informan yang diambil.
4. Usia berada pada tingkat pemuda ke atas.

Sedangkan jumlah informan yang diperlukan tergantung kepada objek dan kasus serta konteks informasi yang diperlukan.

## C. Tahapan Penelitian

Walaupun kegiatan pengumpulan dan analisis data berlangsung serentak dan berulang, namun secara garis besar kegiatan penelitian ini dapat dibagi dalam tiga tingkatan:

1. Tahap *grand tour questions* atau eksplorasi bersifat menyeluruh. Dari kegiatan ini diharapkan telah dapat menemukan data umum sebagai bahan untuk menetapkan situs-situs penelitian.
2. Tahap eksplorasi terfokus; yaitu suatu kegiatan penggalian data secara khusus pada situs-situs tertentu. Eksplorasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus melakukan pengamatan dan analisa secara bertahap terhadap sejumlah situs yang ditetapkan sesuai pokok permasalahan penelitian.

3. Tahap pengujian keabsahan data temuan penelitian. Tahapan ini memiliki sejumlah kegiatan, seperti pengujian validitas data dan pengumpulan data tambahan (bila diperlukan).

**D. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. **Observasi partisipatif**, yaitu peneliti secara aktif berpartisipasi dalam aktifitas-aktifitas al-Ittihadiyah di Medan. Namun pada hari-hari pertama dalam kancah penelitian, peneliti tidak akan begitu aktif melibatkan diri. Ini untuk menjaga latar alamiah penelitian.

Untuk menjaga konsistensi terhadap penelitian ini maka peneliti akan secara selektif memilih aktivitas-aktivitas yang akan diikuti. Dengan kata lain, peneliti hanya akan mengikuti aktivitas yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. **Wawancara mendalam** akan dilakukan untuk menjaring data-data yang berhubungan dengan:
  - a. Arti personal setiap aktivitas bagi subjek.
  - b. Motif, tanggapan (persepsi), perasaan, pikiran, tujuan, subjek dalam menjalankan aktivitas.
  - c. Kesan subjek terhadap masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan mereka.

1. Keterlibatan informan dalam al-Ittihadiyah di Medan lebih dari sekadar.
2. Telah mengikuti lebih dari tiga kegiatan yang berkaitan dengan dinamika al-Ittihadiyah di Medan.
3. Profesi atau pekerjaan yang dikuni berbeda dari setiap informan yang diambil.
4. Usia berada pada tingkat pemuda ke atas.

Sedangkan jumlah informan yang diperlukan tergantung kepada objek dan kasus serta konteks informasi yang diperlukan.

**C. Tahapan Penelitian**

Walaupun kegiatan pengumpulan dan analisis data berlangsung serentak dan berturut-turut, namun secara garis besar kegiatan penelitian ini dapat dibagi dalam tiga tingkatan:

1. Tahap grand tour questions atau eksplorasi bersifat menyeluruh. Dari kegiatan ini diharapkan telah dapat menemukan data umum sebagai bahan untuk menetapkan situs-situs penelitian.
2. Tahap eksplorasi terfokus; yaitu suatu kegiatan penggalan data secara khusus pada situs-situs tertentu. Eksplorasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus melakukan pengamatan dan analisis secara bertahap terhadap sejumlah situs yang ditetapkan sesuai pokok permasalahan penelitian.

d. Usia keterlibatan subjek dalam al-Ittihadiyah di Medan.

3. **Dokumentasi** dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dicatat dan jika mungkin direkam dalam digital recorder. Dalam pencatatan data peneliti akan melakukan hal-hal berikut:

1. Segera mencatat setelah observasi dan setelah berhubungan dengan subjek.
2. Mencatat dengan komprehensif sehingga akan mempermudah dan memperkaya analisa.
3. Hal-hal yang dicatat adalah:
  - a. Peristiwa
  - b. Urutan kejadian
  - c. Situasi tempat
  - d. Gambaran tentang subjek (penampilan, sikap, ekspresi, dsb)
  - e. Pembicaraan. Bila pembicaraan dikutip langsung dari kalimat informan maka akan dicantumkan nama subjek dan diberi tanda petik.
  - f. Perasaan dan tanggapan peneliti. Akan ditandai dengan tanda “[pen]”.

3. Tahap pengujian keabsahan data teman penelitian. Tahapan ini memiliki sejumlah kegiatan, seperti pengujian validitas data dan pengumpulan data tambahan (bila diperlukan).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. **Observasi partisipatif**, yaitu peneliti secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas al-ittihadiyah di Medan. Namun pada hari-hari pertama dalam kancah penelitian, peneliti tidak akan begitu aktif melibatkan diri. Ini untuk menjaga latar alamiah penelitian.

Untuk menjaga konsistensi terhadap penelitian ini maka peneliti akan secara selektif memilih aktivitas-aktivitas yang akan diikuti. Dengan kata lain, peneliti hanya akan mengikuti aktivitas yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. **Wawancara mendalam** akan dilakukan untuk menjangkau data-data yang berhubungan dengan:

- a. Arti personal setiap aktivitas bagi subjek.
- b. Motiv, tanggapan (persepsi), perasaan, pikiran, tujuan, subjek dalam menjalankan aktivitas.
- c. Kesan subjek terhadap masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan mereka.

Usia keterlibatan subjek dalam al-Hitbahiyah di Medan.  
 Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang  
 berkaitan dengan penelitian ini.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dicatat  
 jika mungkin direkam dalam digital recorder. Dalam  
 pencatatan data peneliti akan melakukan hal-hal berikut:

1. Segera mencatat setelah observasi dan setelah berhubungan  
 dengan subjek.

2. Mencatat dengan komprehensif sehingga akan mempermudah  
 dan memperkaya analisis.

Hal-hal yang dicatat adalah:

- a. Peristiwa
- b. Urutan kejadian
- c. Situasi tempat
- d. Gambaran tentang subjek (penampilan, sikap, ekspresi, dsb)
- e. Pembicaraan. Bila pembicaraan dikutip langsung dari  
 kalimat informan maka akan dicantumkan nama subjek dan  
 diberi tanda petik.
- f. Perasaan dan tanggapan peneliti. Akan ditandai dengan  
 tanda "[pen]".

Berikut adalah upaya-upaya peneliti untuk menghindari distorsi data:

- a. Tidak membicarakan hasil observasi kepada orang lain sebelum pencatatan data dilakukan.
- b. Melakukan *recheck* tentang aktivitas subjek dan tentang perasaan, perkataan, pikiran, tanggapan dan pikiran informan.
- c. Meminta bantuan orang lain untuk membaca catatan untuk mengoreksi:
  - 1) Kekurangan data
  - 2) Kontradiksi data
  - 3) Hal-hal yang perlu penjelasan lebih rinci.

**E. Tehnik Analisa Data**

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan waktu dan dana penelitian yang tersedia.

Dalam bukunya *Analisis Data Kualitatif*, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994) yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan catatan lapangan direduksi, diberi kode dan dikategorisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data

yang telah terseleksi tersebut ditampilkan untuk memudahkan proses interpretasi /pemaknaan dan penarikan kesimpulan.

**F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Penelitian ini akan menggunakan teknik penjaminan keabsahan data yang umum terdapat dalam penelitian kualitatif yaitu kredibilitas dan transferabilitas (*credibility and transferability*). Untuk menjaga konsistensi dalam penelitian ini, maka uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti dengan melakukan dua hal berikut:

1. Sedapat mungkin memperpanjang keterlibatan di lapangan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik menguji informasi tertentu yang mungkin disalah tafsirkan peneliti atau informan.
2. Triangulasi sumber dan metode. Data diperoleh dicek ulang dengan sumber berbeda (informan, catatan observasi dan dokumen) dan dengan metode berbeda seperti observasi dan wawancara.

Berikut adalah upaya-upaya peneliti untuk menghindari distorsi data:

- a. Tidak membicarakan hasil observasi kepada orang lain sebelum pencatatan data dilakukan.
- b. Melakukan check tentang aktivitas subjek dan tentang perasaan, perkataan, pikiran, tanggapan dan pikiran informan.
- c. Meminta bantuan orang lain untuk membaca catatan untuk mengoreksi:
  - 1) Kekurangan data
  - 2) Kontradiksi data
  - 3) Hal-hal yang perlu penjelasan lebih rinci.

**E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan waktu dan dana penelitian yang tersedia.

Dalam bukunya Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994) yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan catatan lapangan direduksi, diberi kode dan dikategorisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data

yang telah terseksi tersebut ditampilkan untuk memudahkan proses interpretasi, pemaknaan dan penarikan kesimpulan.

#### F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik penjaminan keabsahan data yang umum terdapat dalam penelitian kualitatif yaitu kredibilitas dan transferabilitas (credibility and transferability). Untuk menjaga konsistensi dalam penelitian ini, maka uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti dengan melakukan dua hal berikut:

1. Sedapat mungkin memperpanjang keterlibatan di lapangan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai informasi tertentu yang mungkin disalah tafsirkan peneliti atau informan.

2. Triangulasi sumber dan metode. Data diperoleh di cek ulang dengan sumber berbeda (informan, catatan observasi dan dokumen) dan dengan metode berbeda seperti observasi dan wawancara.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. TEMUAN UMUM

##### 1. Sejarah lahir dan perkembangan Al-Ittihadiyah

Al-Ittihadiyah didirikan pada tanggal 27 Januari 1935 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1352 H di Medan oleh Syekh K.H. Ahmad Dahlan, ulama besar pada zamannya yang berasal dari Tanjung Pura Langkat (Anzizhan dan Syafaruddin, 2004:68). Organisasi ini dideklarasikan di gedung Zelfstanding Yong Islamiten Bond Jalan Sisingamangaraja, di belakang masjid Raya Medan. Bersama dengan para ulama, cerdik pandai dan murid-muridnya yang berjumlah 200 orang Syekh K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Al-Ittihadiyah (CVO Conferentie, 1941:27).

Secara historis, kehadiran Al-Ittihadiyah juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Islam yang lebih teratur, lebih modern, dan terorganisir ke dalam suatu organisasi, khususnya sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan Islam yang belum tergabung dalam suatu organisasi tertentu. Dalam lapangan pendidikan Islam, Al-Ittihadiyah melihat bahwa pada era 1930-an, daftar pelajaran perguruan-perguruan Islam di Sumatera Timur masih sangat beragam. Di samping itu, guru-guru yang bertugas pada perguruan-perguruan Islam tersebut juga belum memiliki kesamaan persepsi tentang agama Islam. Karena itu, dalam CVO Conferentie Al-

Ittihadiyah (1941:51) dijelaskan bahwa Al-Ittihadiyah didirikan untuk berusaha: (a) mempersatukan daftar peladjaran, dan (b) mempersesoeaikan faham diantara goeroe2 terhadap soal2 jang berhoeboeng dengan agama Islam soemoeanja.

Ketika Muhammadiyah, organisasi massa Islam terlebih dahulu eksis di Sumatera Timur, membangun sekolah-sekolah modern seperti yang dikembangkan Belanda, maka minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sana demikian besar. Di sinilah tokoh-tokoh Al-Ittihadiyah melihat perlunya mereka berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan Islam modern yang lebih teratur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim. Al-Ittihadiyah sebagai organisasi massa Islam memprogramkan aktivitasnya dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi dengan membangun dan mengembangkan sistem pendidikan madrasah dan sekolah modern, panti asuhan dan majelis simpanan dan pertolongan. Dalam mukhtamar ke-17 Al-Ittihadiyah yang berlangsung tanggal 2 s/d 3 Juli 2004 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, terpilih Brigjend (Purn) Drs. H. Nazri Adlani sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah periode 2004-2009. Pada saat itu Nazri Adlani sebagai ketua MUI, dan Wakil Ketua MPR RI utusan Golongan.

Sejatinya semangat perubahan di DPP Al-Ittihadiyah merupakan jasa tak terlupakan almarhum H. Ali Imran Kadir, SH. Ketika beliau mengamanahkan Sekretaris Jenderal DPP Al-

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. TEMUAN UMUM

## 1. Sejarah lahir dan perkembangan Al-Ittihadiyah

Al-Ittihadiyah didirikan pada tanggal 27 Januari 1932 bertempat dengan tanggal 21 Syawal 1352 H di Medan oleh Syekh K.H. Ahmad Dahlan, ulama besar pada zamannya yang berasal dari Tanjung Pura Langkat (Anzihan dan Syatiruddin, 2004:68). Organisasi ini dideklarasikan di gedung Zelfstanding Yong Islamiten Bond Jalan Sisingamangaraja, di belakang masjid Raya Medan. Bersama dengan para ulama, cerdik pandai dan murid-muridnya yang berjumlah 200 orang Syekh K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Al-Ittihadiyah (CVO Conferentie, 1941:37).

Secara historis, kehadiran Al-Ittihadiyah juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Islam yang lebih teratur, lebih modern, dan terorganisir ke dalam suatu organisasi, khususnya sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan Islam yang belum terdapat dalam suatu organisasi tertentu. Dalam lapangan pendidikan Islam, Al-Ittihadiyah melihat bahwa era 1930-an daftar pelajaran perguruan-perguruan Islam di Sumatera Timur masih sangat beragam. Di samping itu, guru-guru yang bertugas pada perguruan-perguruan Islam tersebut juga belum memiliki kesamaan persepsi tentang agama Islam. Karena itu, dalam CVO Conferentie Al-

Ittihadiyah (1941:21) dijelaskan bahwa Al-Ittihadiyah didirikan untuk perusahaan: (a) memperseleksi dan (b) memperseleksi faham diantara gores terhadap soal yang berhubung dengan agama Islam semacam ini.

Ketika Muhammadiyah, organisasi massa Islam terdahulu eksis di Sumatera Timur, membangun sekolah-sekolah modern seperti yang dikembangkan Belanda, maka minat masyarakat untuk menyelenggarakan anaknya ke sana demikian besar. Di sinilah tokoh-tokoh Al-Ittihadiyah melihat perlunya mereka berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan Islam modern yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim. Al-Ittihadiyah sebagai organisasi massa Islam memprogramkan aktivitasnya dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi dengan membangun dan mengembangkan sistem pendidikan madrasah dan sekolah modern, panti asuhan dan majelis simpanan dan pertolongan. Dalam muktamar ke-17 Al-Ittihadiyah yang berlangsung tanggal 2 s.d 3 Juli 2004 di Astana Haji Pondok Gede Jakarta, terpilih Brigjend (Purn) Drs. H. Nazri Adlani sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah periode 2004-2009. Pada saat itu Nazri Adlani sebagai ketua MUI dan Wakil Ketua MPR RI utusan Golongan.

Sejatinnya semangat perubahan di DPP Al-Ittihadiyah merupakan jasa tak terhapuskan almarhum H. Ali Imran Kadit, SH. Ketika beliau memgantikan Sekretaris Jenderal DPP Al-

Ittihadiyah kepada Drs. Anzizhan, MM. tahun 2000, dan pada 2001 datang Drs. Syafaruddin, M.Pd, seorang penulis muda berbakat melanjutkan studinya S3-nya di Jakarta. Mereka aktif membantu kegiatan-kegiatan DPP yang memang lebih banyak kepada taushiah-taushiah kepada pemerintah dan kecaman terhadap dunia barat yang cenderung tidak adil terhadap dunia Islam. Pemikiran mereka terhadap Al-Ittihadiyah ke depan dituangkan dalam buku "Visi Baru Al-ittihadiyah" yang dengan bangga diluncurkan oleh Ketua MPR RI (Prof.Dr.H. Amien Rais) pada pembukaan Mukhtamar ke-17 tahun 2004. Wujud dari keinginan untuk memajukan Al-Ittihadiyah ke depan maka masuklah ke jajaran pengurus kalangan profesional yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang.

Periode kepengurusan 2004-2009, Brijen (Purn) Drs.H.A.Nazri Adlani selaku Ketua Umum, dibantu oleh beberapa staf ketua, dan sekretaris umum H. Martin Roestamy, SH dan Bendahara Drs.Fikri Boreno, MBA. Kemudian setelah berjalan dua tahun masa bakti, terjadi Resufle kepengurusan pada awal 2005 disebabkan H. Martin Roestamy, SH, MH, terpilih sebagai Rektor Universitas Djuanda Bogor, Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Drs. Anzizhan, MM.

Kemudian baru pada Muktamar Al-Ittihadiyah ke-18 tanggal 30 September 2011 di Bogor terpilih Dr. H. Martin Roestamy, SH, MH, menjadi Ketua Umum DPP Al Ittihadiyah

untuk lima tahun ke depan. Di sinilah pentingnya era kebangkitan Al Ittihadiyah untuk menjadi organisasi Islam yang modern. Saat ini muncul semangat membangkitkan Al- ittihadiyah, dengan memberikan nuansa baru persatuan Islam, dan kebersamaan dalam memajukan pendidikan Islam, dakwah, sosial dan ekonomi umat. Pengembangan wilayah dan cabang memang menjadi perhatian, namun seiring dengan itu pembenahan lembaga pendidikan Al Ittihadiyah sebagai bentuk partisipasi aktif mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu keniscayaan.

### 2. Tujuan Organisasi Al-Ittihadiyah

Setiap pendirian sebuah lembaga atau organisasi pastilah memiliki tujuan. Demikian juga halnya dengan pendirian organisasi Al-Ittihadiyah tentunya memiliki tujuan.

Organisasi Al-Ittihadiyah adalah sebuah organisasi masyarakat agama Islam, karena itu tujuan pendirian organisasi ini tentulah untuk meningkatkan kemajuan masyarakat islam sehingga mampu hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.

Dalam meningkatkan atau memajukan masyarakat islam di Sumatera Utara khususnya di kota Medan, organisasi Al-Ittihadiyah telah menunjukkan kiprah dan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa peran Al-Ittihadiyah dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Ittihadiyah kepada Drs. Anzishan, MM. tahun 2000, dan pada 2001 datang Drs. Syafaruddin, M.Pd, seorang penulis muda berkarir melanjutkan studinya 23-nya di Jakarta. Mereka aktif membantu kegiatan-kegiatan DPP yang memang lebih banyak kepada taushiah-taushiah kepada pemerintah dan kecamatan terhadap dunia barat yang cenderung tidak adil terhadap dunia Islam. Pemikiran mereka terhadap Al-Ittihadiyah ke depan dituangkan dalam buku "Visi Baru Al-Ittihadiyah" yang dengan bangga diluncurkan oleh Ketua MPR RI (Prof.Dr.H. Amien Rais) pada pembicaraan Mukhtamar ke-17 tahun 2004. Wujud dari keinginan untuk memajukan Al-Ittihadiyah ke depan maka masalah ke janaan pengurus kalangan profesional yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang.

Periode kepemimpinan 2004-2009, Brijen (Pum) Drs.H.A.Nazri Adhoni selaku Ketua Umum, dibantu oleh beberapa staf ketua, dan sekretaris umum H. Martin Roestany, SH dan bendahara Drs.Fiki Borno, MBA. Kemudian setelah berjalan dua tahun masa bakti, terjadi Resolusi kepemimpinan pada awal 2005 disabdakan H. Martin Roestany, SH, MH, terpilih sebagai Rektor Universitas Djanda Bogor, Sekretaris Jenderal dipertanyakan kepada Drs. Anzishan, MM.

Kemudian baru pada Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-18 tanggal 30 September 2011 di Bogor terpilih Dr. H. Martin Roestany, SH, MH, menjadi Ketua Umum DPP Al Ittihadiyah

a. Peran Al-Ittihadiyah dalam Bidang Dakwah

Secara umum, ada dua istilah yang berkembang di kalangan komunitas al-Ittihadiyah berkaitan dengan dakwah. *Pertama*, dakwah disebut dengan propaganda Islam dan *kedua*, dakwah juga disebut dengan *tabligh*.

Istilah propaganda Islam tampaknya merupakan term yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang belum memeluk suatu agama. Istilah propaganda dikembangkan dari *propagandisten* yang juga dimaknai dengan *muballighi* yang diutus ke suatu tempat untuk menyiarkan agama Islam.<sup>44</sup> Contoh untuk hal ini, adalah pengiriman para *ustadz* dan *muballigh* Al-Ittihadiyah ke Tanah Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Aktivitas inilah yang selalu dilakukan Al-Ittihadiyah sejak organisasi ini didirikan sampai masa kemerdekaan, Orde Lama.

Agak berbeda dengan propaganda, term *tabligh* tampaknya dimaknai sebagai upaya menyampaikan segala hukum-hukum Islam dengan tujuan agar umat Islam taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Pada awalnya, aktivitas propaganda Islam disatukan dengan pers dibawah Majelis Pers dan Propaganda Islam, sedangkan *tabligh* memiliki majelis tersendiri yang disebut Majelis Tabligh. Namun dalam perkembangan selanjutnya, majelis pers dan propaganda Islam dihapuskan. Dalam tahun 1960, badan

<sup>44</sup> Lihat Mohd. Sjarief Pohan, 'Kepentingan Propaganda Islam' dalam CVO Conferentie, *ibid.*, h. 89.

untuk lima tahun ke depan. Di sinilah pentingnya era kebangkitan Al-Ittihadiyah untuk menjadi organisasi Islam yang modern. Saat ini muncul semangat membangkitkan Al-Ittihadiyah, dengan membetulkan manusia baru persatuan Islam, dan kebersamaan dalam menjalankan pendidikan Islam, dakwah, sosial dan ekonomi umat. Pengembangan wilayah dan cabang memang menjadi perhatian, namun seiring dengan itu pembedahan lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah sebagai bentuk partisipasi aktif mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu kemiscayaan.

2. Tujuan Organisasi Al-Ittihadiyah

Setiap pendirian sebuah lembaga atau organisasi pastilah memiliki tujuan. Demikian juga halnya dengan pendirian organisasi Al-Ittihadiyah tentunya memiliki tujuan.

Organisasi Al-Ittihadiyah adalah sebuah organisasi masyarakat agama Islam, karena itu tujuan pendirian organisasi ini tentulah untuk meningkatkan kemajuan masyarakat Islam sehingga mampu hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.

Dalam meningkatkan atau memajukan masyarakat Islam di Sumatera Utara khususnya di kota Medan, organisasi Al-Ittihadiyah telah menunjukkan kiprah dan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa peran Al-Ittihadiyah dalam kehidupan masyarakat tersebut.

#### a. Peran Al-Ittihadiyah dalam Bidang Dakwah

Secara umum, ada dua istilah yang berkembang di kalangan komunitas al-ittihadiyah berkaitan dengan dakwah. Pertama, dakwah disebut dengan propaganda Islam dan kedua, dakwah juga disebut dengan tabligh.

Istilah propaganda Islam tampaknya merupakan term yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang belum memeluk suatu agama. Istilah propaganda dikembangkan dari propagandisten yang juga dimaknai dengan *propaganda* yang diurus ke suatu tempat untuk menyebarkan agama Islam.<sup>44</sup> Contoh untuk hal ini, adalah pengiriman para *muallim* dan *muallimat* Al-Ittihadiyah ke Tanah Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Aktivitas inilah yang selalu dilakukan Al-Ittihadiyah sejak organisasi ini didirikan sampai masa kemerdekaan Orde Lama.

Agak berbeda dengan propaganda, term *tabligh* tampaknya dimaknai sebagai upaya menyampaikan segala hukum-hukum Islam dengan tujuan agar umat Islam taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Pada awalnya, aktivitas propaganda Islam disatukan dengan pers dibawah Majelis Pers dan Propaganda Islam, sedangkan *tabligh* memiliki majelis tersendiri yang disebut Majelis Tabligh. Namun dalam perkembangan selanjutnya, majelis pers dan propaganda Islam dihapuskan. Dalam tahun 1960, badan

<sup>44</sup> Lihat Mohd. Sjafer Pohan, 'Keperguruan Propaganda Islam', dalam CVO Conference, Vol. 1, h. 89.

otonom yang mengurus dakwah berada dibawah kendali Majelis Tabligh Al-Ittihadiyah. Sedangkan untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum memeluk suatu agama dan mengurus mereka, selai Majelis Tabligh, dibentuk pula Zending Islam Al-Ittihadiyah. Istilah ini tetap dipertahankan sampai masa Orde Baru, bedanya, istilah Majelis Tabligh disatukan dengan dakwah.<sup>45</sup>

#### b. Peran al-Ittihadiyah dalam Bidang Sosial

Dalam lapangan sosial, aktivitas Al-Ittihadiyah yang paling menonjol adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak miskin dan yatim. Untuk keperluan ini, sejak tahun 1943, Al-ittihadiyah telah mendirikan panti asuhan anak miskin dan yatim di Jalan Japaris Medan. Ketika terjadi revolusi kemerdekaan yang diikuti oleh agresi Belanda ke Sumatera Timur, panti asuhan anak-anak miskin dan yatim yang ada di sana diungsikan ke Pematang Siantar kemudian ke Tebing Tinggi. Kemudian pada tahun 1948, panti asuhan tersebut dipindahkan kembali ke kota Medan bertempat di Jalan Sei Kera Nomor 199. Baru pada 5 Januari 1957, Al-Ittihadiyah berhasil menempatkan panti asuhannya secara permanen di jalan Bromo, Kampung Tegal Sari Medan. Panti asuhan Mamiyai ini tetap eksis dan melaksanakan kegiatannya hinggasekarang.

<sup>45</sup> Lihat Bachroem Azhar et. al., *op. cit.*, hlm. 16 dan Muchlis Arsjad et. al., *p. cit.*, h. 20-21

otonom yang mengurus dakwah betas dibawah kendali Majelis Tabligh Al-Ittihadiyah. Sedangkan untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum memeluk suatu agama dan mengurus mereka, selai Majelis Tabligh, dibentuk pula Zending Islam Al-Ittihadiyah. Isialah ini tetap dipertahankan sampai masa Orde Baru, bedanya, istilah Majelis Tabligh disatukan dengan dakwah.<sup>42</sup>

#### b. Peran al-Ittihadiyah dalam Bidang Sosial

Dalam lapangan sosial, aktivitas Al-Ittihadiyah yang paling menonjol adalah mengurus, memelihara, dan mendidik anak-anak miskin dan yatim. Untuk keperluan ini, sejak tahun 1943, Al-Ittihadiyah telah mendirikan panti asuhan anak miskin dan yatim di Jalan Japaris Medan. Ketika terjadi revolusi kemerdekaan yang diikuti oleh agresi Belanda ke Sumatera Timur, panti asuhan anak-anak miskin dan yatim yang ada di sana diungsikan ke Perantauan Siantar kemudian ke Teling Tinggi. Kemudian pada tahun 1948, panti asuhan tersebut dipindahkan kembali ke kota Medan bertempat di Jalan Sei Kera Nomor 199. Baru pada 2 Januari 1957, Al-Ittihadiyah berhasil menempatkan panti asuhannya secara permanen di Jalan Bromo, Kampung Tejal Sari Medan. Panti asuhan Mamiyai ini tetap eksis dan melaksanakan kegiatannya hingga sekarang.

<sup>42</sup> Lihat Bachroem Azhar et al., op. cit., hlm. 16 dan Muchlis Arjand et al., op. cit., h. 20-21

Dalam panti asuhan Mamiyai, anak-anak yatim tidak saja diberikan perawatan atau pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga dibina ruhaniahnya yang menyangkut ilmu pengetahuan dan *akhlaq al-karimah*. Al-Ittihadiyah menyediakan lembaga-lembaga pendidikan, seperti Sekolah Rakyat, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Tsanawi, Aliyah, dan PGA bagi pembinaan kecerdasan, keterampilan, dan *akhlak al-karimah* anak-anak yatim yang berdomisili di sana.

Selain membina panti asuhan untuk menyantuni, memelihara, dan mendidik anak-anak yatim, aktivitas sosial Al-Ittihadiyah juga difokuskan pada upaya membantu para *muallaf* dengan membangun asrama zending Islam. Di dalam asrama zending Islam ini, para *muallaf* dididik dengan ajaran Islam, dengan harapan agar kelak mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya.

### 3. Struktur organisasi Al-Ittihadiyah Kota Medan

Sebagai sebuah organisasi, Al-Ittihadiyah memiliki struktur organisasi atau kepengurusan dari tingkat pusat, tingkat wilayah atau provinsi dan tingkat cabang. Kepengurusan pusat berkedudukan di Jakarta sebagai Ibukota negara, kepengurusan tingkat wilayah berkedudukan di ibukota provinsi dalam hal ini dikota medan dan selanjutnya kepengurusan tingkat cabang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota madya.

Penelitian ini tidak membahas organisasi Al-Ittihadiyah secara nasional dan wilayah tetapi hanya membahas tentang Al-Ittihadiyah di Medan, yang berarti hanya membahas di tingkat cabang. Karena itu tulisan ini tidak menguraikan bagaimana susunan kepengurusan Al-Ittihadiyah di tingkat pusat maupun tingkat wilayah atau provinsi, tetapi hanya membahas susunan pengurus ditingkat cabang kota Medan.

Dari hasil penelitian penulis, adapun susunan pengurus Al-Ittihadiyah tingkat cabang kota Medan adalah sebagai berikut:

#### Susunan Dewan Pimpinan Cabang Al-Ittihadiyah Kota Medan Periode 2014-2019

##### DEWAN PEMBINA

: Walikota Medan

Ketua DPRD Kota Medan

Kepala Kantor KAMENAG

Kota Medan

Dra. Hj. Nurhayati Zein, M.Pd

Dra. Hj. Nurhabibah Hasibuan

Drs. M. Husin Ishak Rangkuti

H. Syamsul Arifin, SE

Drs. H. Abdillah, Ak. M.BA

Ir. Ahmad Parlindungan

Batubara, M.Si

H. Nuruddin Rangkuti, B.A

##### MAJELIS PAKAR

KETUA UMUM	: H. Syahdin Kesogihen, B.A
Wakil Ketua I	: Drs. H. Sempurna Silalahi
Wakil Ketua II	: Anwar S.E
Wakil Ketua III	: H. Ihwan Ritonga, S.E
Wakil Ketua IV	: H. Muladi
Wakil Ketua V	: Drs. Irwan Sakti Lubis
Wakil Ketua VI	: Drs. H.M Zuhri Pulungan
Wakil Ketua VII	: Ali Imran Rangkuti, S.H
Wakil Ketua VIII	: H. Sudirman, S.Pd
Wakil Ketua IX	: Agah Berutu, S.H
SEKRETARIS UMUM	: Hj. Wagini
Wakil Sekretaris I	: Syofyan Sauri, S.Pd. I
Wakil Sekretaris II	: Muslim ABD. Rahman, S.Ag
Wakil Sekretaris III	: Drs. Syahrul Saragih
Wakil Sekretaris IV	: Mardian Habibi Gultom, ST
Wakil Sekretaris V	: Saharuddin Siregar
Wakil Sekretaris VI	: Sulaiman, SE
Wakil Sekretaris VII	: Drs. Arman Samara SH
Wakil Sekretaris VIII	: Drs. H. Ahmad Sanadi Sitorus
Wakil Sekretaris IX	: Drs. Agus Salim
BENDAHARA UMUM	: Khairida Kurniati Siregar,
WAKIL BENDAHARA	: Drs. Sumardi Lingga
BIDANG-BIDANG	: Hj. Sakiah Nur
A. BIDANG ORGANISASI	: 1. Nazamuddin Lubis

Penelitian ini tidak membahas organisasi Al-Ittibadiyah secara nasional dan wilayah tetapi hanya membahas tentang Al-Ittibadiyah di Medan yang berarti hanya membahas di tingkat cabang. Karena itu tulisan ini tidak menguraikan bagaimana susunan kepengurusan Al-Ittibadiyah di tingkat pusat maupun tingkat wilayah atau provinsi, tetapi hanya membahas susunan pengurus di tingkat cabang kota Medan.

Dari hasil penelitian penulis, adapun susunan pengurus Al-Ittibadiyah tingkat cabang kota Medan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Pimpinan Cabang Al-Ittibadiyah Kota Medan

Periode 2014-2019

DEWAN PEMBINA	: Walikota Medan
Ketua DPRD Kota Medan	
Kepala Kantor KAMENAG Kota Medan	
Dra. Hj. Nurhayati Zein, M.Pd	
Dra. Hj. Nurhabibah Hasibuan	
Drs. M. Husin Ishak Rangkuti	
H. Syamsul Arifin, SE	
Drs. H. Abdillah. Ak. M.BA	
Ir. Ahmad Parhindungan	
Batubara, M.Si	
H. Nuruddin Rangkuti, B.A	
MAJELIS PAKAR	

A. BIDANG ORGANISASI	
BIDANG-BIDANG	
WAKIL BENDAHARA	Hj. Goldah Nur
BENDAHARA UMUM	Dr. Sumardi Lingga
Wakil Sekretaris IX	Khairida Kumari Siregar
Wakil Sekretaris VIII	Dr. Agus Salim
Wakil Sekretaris VII	Dr. H. Ahmad Samadi Situmorang
Wakil Sekretaris VI	Dr. Aman Samara SH
Wakil Sekretaris V	Sulaiman SE
Wakil Sekretaris IV	Saharuddin Siregar
Wakil Sekretaris III	Mardian Habibi Gultom ST
Wakil Sekretaris II	Dr. Syahrul Saragih
Wakil Sekretaris I	Muslim ABD. Rahman, S.Ag
SEKRETARIS UMUM	Syofan Saari, S.Pd I
Wakil Ketua IX	Hj. Wagini
Wakil Ketua VIII	Agah Berutu, S.H
Wakil Ketua VII	H. Sudirman, S.Pd
Wakil Ketua VI	Ali Imran Rangkuti, S.H
Wakil Ketua V	Dr. H.M. Zubri Pulungan
Wakil Ketua IV	Dr. Irwan Sakti Lubis
Wakil Ketua III	H. Maladi
Wakil Ketua II	H. Irwan Ritonga, S.E
Wakil Ketua I	Anwar S.E
KETUA UMUM	Dr. H. Sempurna Silalahi
	H. Syaedin Kesogihan, B.A

- B. BIDANG PENDIDIKAN
- 2. Tohiruddin Nst
  - 3. Sumihar Hasibuan

- C. BIDANG DAKWAH
- 1. Sahlul Habib Nst
  - 2. Syafi'i
  - 3. Ali Sadikin
  - 4. Darwin Rangkuti

- D. BIDANG PEMUDA DAN OLAAHRAGA :
- 1. H. Mhd. Yahya
  - 2. Rusmin Rangkuti
  - 3. Abd. Karim B.M

- 1. Mhd. Daud
- 2. Selamat Rangkuti
- 3. Naimah Nasution

**B. TEMUAN KHUSUS DAN PEMBAHASAN**

**1. Pandangan Al-Ittihadiyah tentang Pendidikan.**

Sejalan dengan tujuan pendirian Organisasi Al-Ittihadiyah adalah untuk memajukan masyarakat islam agar mampu hidup sesuai dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan, maka organisasi ini sangat menyadari pentingnya pendidikan bagi masyarakat islam. Atas dasar itu organisasi al Ittihadiyah berusah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan agama maupun lembaga pendidikan umum, dengan tujuan sebagai berikut:

- d) Menciptakan putra/I muslim agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia dan akhirat.
- e) Bertujuan 'ubudiyah', yakni agar putra/I muslim memperhambakan dirinya kepada Allah swt.
- f) Menjadikan putra/I muslim dan menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia.<sup>46</sup>

Berdasarkan tujuan di atas, maka dalam persepektif Al-Ittihadiyah, pendidikan Islam harus mempersatukan tiga aspek utama yang disebut sebagai tiga serangkai, yaitu ilmu, iman, dan amal guna membentuk manusia agar menjadi umat yang berilmu, beriman, dan beramal yang dihiasi dengan akhlak budi pekerti yang luhur.<sup>47</sup>

Untuk mencapai hal tersebut, Al-Ittihadiyah menerapkan dwi sistem dalam pelaksanaan pendidikannya dengan membangun dan mengembangkan sekaligus sistem pendidikan madrasah dan persekolahan. Untuk mengorganisir dan memajukan kedua sistem kelembagaan pendidikan tersebut, Al-Ittihadiyah membentuk badan otonom yang disebut Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihadiyah.

<sup>46</sup> K.H. Sajuhti Noor, 'Dakwah dan Pendidikan Islam' dalam *Buku Mukhamar Al-Ittihadiyah ke XII* (Badung: Seksi Publikasi Panitia Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-13, 1968), h. 52-53.  
<sup>47</sup> K.H. Sajuhti Noor, *ibid.*, h. 53.

- 2. Tohiduddin Nst
  - 3. Suatibar Hasibuan
  - 1. Sahul Habib Nst
  - 2. Syarif
  - 3. Ali Sadikin
  - 4. Darwin Rangkuti
  - 1. H. Mhd. Yanya
  - 2. Ruzmin Rangkuti
  - 3. Abd. Karim B.M.
- B. BIDANG PENDIDIKAN
- C. BIDANG DAKWAH
- D. BIDANG PEMUDA DAN OLARAGA:
- 1. Mhd. Daud
  - 2. Selamat Rangkuti
  - 3. Naimah Nasution

B. TEMUAN KHUSUS DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Al-Ittihadiyah tentang Pendidikan.

Sejalan dengan tujuan pendidikan Organisasi Al-Ittihadiyah adalah untuk memajukan masyarakat islam agar mampu hidup sesuai dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan, maka organisasi ini sangat menyadari pentingnya pendidikan bagi masyarakat islam. Atas dasar itu organisasi Al-Ittihadiyah berusaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan agama maupun lembaga pendidikan umum dengan tujuan sebagai berikut:

- (d) Menciptakan putra muslim agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia dan akhirat.
- (e) Bertujuan 'ubudiyah', yakni agar putra muslim memperhatikan dirinya kepada Allah swt.
- (f) Menjadikan putra muslim dan menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia.<sup>66</sup>

Berdasarkan tujuan di atas, maka dalam perspektif Al-Ittihadiyah, pendidikan Islam harus memperhatikan tiga aspek utama yang disebut sebagai tiga serangkai, yaitu iman, iman, dan amal guna membentuk manusia agar menjadi umat yang beriman, beramal, dan beramal yang dibina dengan akhlak budi pekerti yang luhur.<sup>67</sup>

Untuk mencapai hal tersebut, Al-Ittihadiyah menerapkan dua sistem dalam pelaksanaan pendidikannya dengan membangun dan mengembangkan sekaligus sistem pendidikan madrasah dan persekolahan. Untuk mengorganisir dan menjalankan kedua sistem kelengkapan pendidikan tersebut, Al-Ittihadiyah membentuk badan otonom yang disebut Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihadiyah.

<sup>66</sup> K.H. Saifuddin Noor, 'Dakwah dan Pendidikan Islam' dalam Buku Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke XVII (Bandung: Seksi Publikasi Panitia Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-13, 1968), h. 22-23.

<sup>67</sup> K.H. Saifuddin Noor, ibid., h. 23.

Sejak berdiri hingga masa pemerintahan orde baru, organisasi Al-Ittihadiyah telah berhasil membangun sejumlah sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Bahkan ketika usia Al-Ittihadiyah mencapai seperempat abad, dilaporkan bahwa organisasi Islam ini secara nasional telah memiliki 177 unit madrasah Tahdjhizi, Ibtidai, Tsanawiyah, dan Qismu Ali, 5 Unit Madrasah wajib belajar, 5 unit PGA, 21 unit sekolah rakyat, 3 unit SMP dan 1 Unit SMA. Jumlah tersebut terus meningkat sehingga pada awal masa orde baru, Al-Ittihadiyah telah memiliki 231 unit madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah dan qismu ali, 7 unit PGA 6 tahun, 35 unit sekolah yang terdiri dari SR, SMP, SMA dan sebuah perguruan tinggi yang ada di jalan Gedung Arca dekat Stadion Teladan Medan.

Secara rinci, jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun Al-Ittihadiyah sejak orde lama sampai orde baru adalah seperti terlihat dalam tabel berikut:

No	Lembaga Pendidikan	Masa/Periode	
		Orde Lama	Orde Baru
1	Madrasah Tahdjhizi, Ibtidai, Tsanawi, dan Qismu Ali	177	231
2	Madrasah Wajib Belajar	5	-
3	PGA	5	7
4	SR/SD	21	35

5	SMP	3	6
6	SMA	1	7
7	Perguruan tinggi	-	1

Demikian lembaga-lembaga pendidikan yang berhasil dibangun oleh organisasi Al-Ittihadiyah sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam memajukan kualitas masyarakat islam dalam menghadapi tuntutan zaman sekaligus menunjukkan peran serta dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.

Pada perkembangannya sejak pengurus AL-Ittihadiyah berkecimpung dalam bidang politik maka peran lembaga/ortom bidang pendidikan tidak banyak berperan atau boleh dikatakan terjadi kekosongan pembinaan sekolah-sekolah yang ada sehingga pihak yayasan dan kepala sekolah secara struktural tidak lagi melaporkan perkembangan sekolah kepada organisasi.

## 2. Ciri khas lembaga pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah

Sejauh ini menurut penelitian penulis, apa yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah khususnya di kota Medan adalah adanya keseimbangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Artinya, organisasi Al-Ittihadiyah tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan agama saja atau lembaga pendidikan umum saja. Kedua pendidikan ini didirikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan perkembangan zaman. Pendirian dua lembaga yang bernaung di

Sejak berdiri hingga masa pemerintahan orde baru, organisasi Al-Ittihadiyah telah berhasil membangun sejumlah sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Bahkan ketika usia Al-Ittihadiyah mencapai seperempat abad, dilaporkan bahwa organisasi islam ini secara nasional telah memiliki 177 unit madrasah Tahdibiyah Ibtidai, Tsanawiyah, dan Qismu Ali, 5 Unit Madrasah Wajib Belajar, 2 unit PGA, 21 unit sekolah rakyat, 3 unit SMP dan 1 Unit SMA. Jumlah tersebut terus meningkat sehingga pada awal masa orde baru, Al-Ittihadiyah telah memiliki 231 unit madrasah Ibtidaiyah, tsanawiyah dan qismu ali, 7 unit PGA dan 35 unit sekolah yang terdiri dari SR, SMP, SMA dan sebuah perguruan tinggi yang ada di jalan Gedung Arca dekat Stadion Teladan Medan.

Secara rinci, jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun Al-Ittihadiyah sejak orde lama sampai orde baru adalah seperti terlihat dalam tabel berikut:

No	Lembaga Pendidikan	Masa Periode	
		Orde Lama	Orde Baru
1	Madrasah Tahdibiyah Ibtidai, Tsanawi dan Qismu Ali	177	231
2	Madrasah Wajib Belajar	2	-
3	PGA	2	7
4	SRSD	21	32

2	SMP	3	6
6	SMA	1	7
7	Perguruan tinggi	-	1

Demikian lembaga-lembaga pendidikan yang berhasil dibangun oleh organisasi Al-Ittihadiyah sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kualitas masyarakat Islam dalam menghadapi tuntutan zaman sekaligus menunjukkan peran serta dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.

Pada perkembangannya sejak pengurus Al-Ittihadiyah berkecimpung dalam bidang politik maka peran lembaga/ortom bidang pendidikan tidak banyak berperan atau boleh dikatakan terjadi kekosongan pembinaan sekolah-sekolah yang ada sehingga pihak yayasan dan kepala sekolah secara struktural tidak lagi melaporkan perkembangan sekolah kepada organisasi.

### 2. Ciri khas lembaga pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah

Sejauh ini menurut penelitian penulis, apa yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah khususnya di kota Medan adalah adanya keseimbangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Artinya, organisasi Al-Ittihadiyah tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan agama saja atau lembaga pendidikan umum saja. Kedua pendidikan ini didirikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan perkembangan zaman. Pendirian dua lembaga yang berwujud di

kementrian agama dan Kemendikbud sama sama dikelola organisasi sejalan dengan perkembangan sekolah dan madrasah yang mendapat tempat dipemerintahan dengan status yang sama. Artinya baik madrasah dan sekolah memiliki peran yang sama dalam pemerintahan, sama-sama membangun dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa.

Sangat diterima akal, pendirian lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama secara seimbang, adalah mengingat bahwa Al-Ittihadiyah sebuah organisasi agama, disisi lain organisasi ini menyadari bahwa lembaga pendidikan umum sangat penting bagi masyarakat.

Dalam hal ini penulis memandang bahwa lembaga pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi-organisasi Islam lainnya, seperti Al-Wasyiyah, Muhammadiyah dan lain-lain.

Dalam konteks ini dapat dilihat persamaannya bahwa organisasi-organisasi Islam yang ada di kota Medan sama-sama membangun lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan umum maupun pendidikan agama. Selain itu masing-masing lembaga pendidikan ini bertujuan untuk membantu masyarakat Islam yang dipandang kurang mampu dalam bidang ekonomi.

Namun sejalan dengan dinamika kepengurusan organisasi Al-Ittihadiyah yang memindahkan kantor organisasi dari Medan ke pusat pemerintahan di Jakarta, terjadi penurunan yang sangat

...kementerian agama dan Kemendikbud sama-sama dikelola organisasi sejalan dengan perkembangan sekolah dan madrasah yang mendapat tempat dipemerintahan dengan status yang sama. Artinya baik madrasah dan sekolah memiliki peran yang sama dalam pemerintahan, sama-sama membangun dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa.

Sangat diterima akal, pendirian lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama secara seimbang, adalah mengingat bahwa Al-Ittihadiyah sebuah organisasi agama, disisi lain organisasi ini menyadari bahwa lembaga pendidikan umum sangat penting bagi masyarakat.

Dalam hal ini penulis memandang bahwa lembaga pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi-organisasi islam lainnya, seperti Al-Wasyliah, Muhammadiyah dan lain-lain.

Dalam konteks ini dapat dilihat persamaannya bahwa organisasi-organisasi islam yang ada di kota medan sama-sama membangun lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan umum maupun pendidikan agama. Selain itu masing-masing lembaga pendidikan ini bertujuan untuk membantu masyarakat islam yang dipandang kurang mampu dalam bidang ekonomi.

Namun sejalan dengan dinamika perkembangan organisasi Al-Ittihadiyah yang mendirikan kantor organisasi dari medan ke pusat pemerintahan di Jakarta, terjadi penurunan yang sangat

signifikan dalam mengelola organisasi terutama dalam bidang pendidikan. Pengurus organisasi lebih banyak berperan kedalam kancah politik dibanding mengurus organisasi bagi kepentingan umat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada mantan ketua Al-Ittihadiyah wilayah kota medan terungkap bahwa kemunduran organisasi Al-Ittihadiyah di kota medan salah satu penyebabnya adalah karena banyak pengurus masuk kedalam salah satu partai politik untuk menjadi anggota dewan dan menduduki jabatan politik. Organisasi Al-Ittihadiyah dijadikan kendaraan politik masa itu karena basis masanya sangat diperhitungkan.

Dapat dipahami karena para pengurus sibuk melakukan kegiatan politik, maka urusan organisasi menjadi terabaikan. Begitu juga dengan kegiatan yang berhubungan dengan urusan pendidikan. Madrasah dan sekolah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada pembinaan dari pengurus, sehingga lambat laun pihak yayasan dan kepala sekolah merasa memiliki dengan artian menjadi milik pribadi atau keluarga.

### 3. Tantangan yang Dihadapi dalam Bidang Pendidikan

Dari hasil penelitian penulis, perkembangan lembaga yang dikelola oleh organisasi Al-Ittihadiyah di kota Medan mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Potensi kelembagaan pendidikan yang sudah pernah didirikan dengan jumlah unit yang begitu banyak, serta tingkat pendidikan yang bervariasi, seharusnya menjadi potensi yang memiliki peluang yang cukup prospektif dan

fungsional bagi membina generasi muda dan merajut kebersamaan komunitas muslim sebagai umat islam Indonesia sesuai dengan cita-cita dan harapan ketika organisasi Al-Ittihadiyah mula-mula didirikan.

Namun dalam kenyataannya jumlah lembaga pendidikan yang sudah sempat berdiri tadi lama kelamaan secara berangsur mengalami penurunan atau tutup, sehingga saat ini jumlah lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi Al-Ittihadiyah tinggal beberapa unit saja.

Ada beberapa faktor menurut penulis yang menjadi penyebab menurunnya jumlah lembaga pendidikan ini, ada yang bersifat faktor eksternal dan ada juga faktor yang bersifat internal. Faktor eksternal misalnya: peraturan pemerintah yang meniadakan atau menghapus lembaga pendidikan guru agama; pendirian madrasah aliyah sehingga minat masyarakat ke qismu ali menjadi berkurang drastis dan akhirnya tutup. Sedangkan faktor internal menurut hasil penelitian penulis adalah bahwa dalam sejumlah kasus, ada upaya-upaya dari kalangan tertentu untuk merubah status kelembagaan pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah bahkan aset Al-Ittihadiyah yang lain menjadi milik pribadi. Sehingga lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah yang dikelola hingga saat ini di kota Medan hanyalah sebagai berikut:

1. Jl. Bromo yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, MDA, Mts dan Aliyah

signifikan dalam mengelola organisasi terutama dalam bidang pendidikan. Pengurus organisasi lebih banyak berperan kedalam kancah politik dibanding pengurus organisasi bagi kepentingan umat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada mantan ketua Al-Ittihadiyah wilayah kota medan terungkap bahwa kemunduran organisasi Al-Ittihadiyah di kota medan salah satu penyebabnya adalah karena banyak pengurus masuk kedalam salah satu partai politik untuk menjadi anggota dewan dan menduduki jabatan politik. Organisasi Al-Ittihadiyah dijadikan kendaraan politik masa itu karena basis massanya sangat dipertimngkan.

Dapat dipahami karena para pengurus sibuk melakukan kegiatan politik, maka urusan organisasi menjadi terabaikan. Begitu juga dengan kegiatan yang berhubungan dengan urusan pendidikan. Madrasah dan sekolah sendiri-sendiri tanpa ada pembinaan dari pengurus, sehingga lambat laun pihak yayasan dan kepala sekolah merasa memiliki dengan srian menjadi milik pribadi atau keluarga.

### 3. Tantangan yang Dihadapi dalam Bidang Pendidikan

Dari hasil penelitian penulis, perkembangan lembaga yang dikelola oleh organisasi Al-Ittihadiyah di kota Medan mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Potensi kelembagaan pendidikan yang sudah pernah didirikan dengan jumlah unit yang begitu banyak, serta tingkat pendidikan yang bervariasi, seharusnya menjadi potensi yang memiliki peluang yang cukup prospektif dan

fungsiional bagi membina generasi muda dan merajut kebersamaan komunitas muslim sebagai umat islam Indonesia sesuai dengan cita-cita dan harapan ketika organisasi Al-Ittihadiyah mula-mula didirikan.

Namun dalam kenyataannya jumlah lembaga pendidikan yang sudah sempat berdiri tadi lama kelamaan secara bertahap mengalami penurunan dan tutup, sehingga saat ini jumlah lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi Al-Ittihadiyah tinggal beberapa unit saja.

Ada beberapa faktor menurut penulis yang menjadi penyebab menurunnya jumlah lembaga pendidikan ini, ada yang bersifat faktor eksternal dan ada juga faktor yang bersifat internal. Faktor eksternal misalnya: penurunan pemerintahan yang meniadakan atau menghapus lembaga pendidikan guru agama; pendirian madrasah aliyah sehingga minat masyarakat ke disiplin ini menjadi berkurang drastis dan akhirnya tutup. Sedangkan faktor internal menurut hasil penelitian penulis adalah bahwa dalam sejumlah kasus, ada upaya-upaya dari kalangan tertentu untuk merubah status kelembagaan pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah bahkan aset Al-Ittihadiyah yang lain menjadi milik pribadi. Sehingga lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah yang dikelola hingga saat ini di Kota Medan hanyalah sebagai berikut:

1. Jl. Bromo yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, MDA, Ma dan Aliyah

2. Jl. Gedung Arca yang terdiri dari SMP dan SMA
3. Pangkalan Mashur SD, SMP
4. Jl Sei Kera Paud dan MDA

Dari keempat lokasi ini, kondisi sekolah dan madrasah tidak berkembang sebagaimana mestinya. Madrasah dan sekolah tidak mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain baik yang dikelola olah negri maupun swasta. Dari keempat lokasi ini yang dianggap masih baik hanya madrasah dan sekolah yang terletak di Jl. Bromo. Berdasarkan data yang ada, SD

Menurut hemat penulis, faktor internal yang menyebabkan terjadinya pengalihan lembaga-lembaga pendidikan ini sangat ditentukan oleh krisis kepemimpinan yang visioner dan lemahnya manajemen kelembagaan ditubuh organisasi Al-Ittihadiyah.

Karena itu menurut hemat penulis, tugas utama pengurus Al-Ittihadiyah yang paling mendesak untuk saat ini antara lain adalah melakukan inventarisasi ulang terhadap aset-aset organisasi Al-Ittihadiyah terutama dalam bidang lembaga pendidikan untuk selanjutnya dikelola dengan manajemen yang transparan, akuntabel, dan profesional.

2. Jl. Gedung Arca yang terdiri dari SMP dan SMA

3. Pangkalan Masher SD, SMP

4. Jl. Sei Kera Pand dan MDA

Dari keempat lokasi ini, kondisi sekolah dan madrasah tidak berkembang sebagaimana mestinya. Madrasah dan sekolah tidak mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain baik yang dikelola oleh negeri maupun swasta. Dari keempat lokasi ini yang dianggap masih baik hanya madrasah dan sekolah yang terletak di Jl. Bromo. Berdasarkan data yang ada, SD

Menurut hemat penulis, faktor internal yang menyebabkan terjadinya pengalihan lembaga-lembaga pendidikan ini sangat ditentukan oleh krisis kepemimpinan yang visioner dan lembaga manajemen kepemimpinan di dalam organisasi Al-Ittihadiyah.

Karena itu menurut hemat penulis, tugas utama pengurus Al-Ittihadiyah yang paling mendesak untuk saat ini antara lain adalah melakukan inventarisasi ulang terhadap aset-aset organisasi Al-Ittihadiyah terutama dalam bidang lembaga pendidikan untuk selanjutnya dikelola dengan manajemen yang transparan, akuntabel, dan profesional.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Ittihadiyah memandang bahwa pendidikan sangat penting dan strategis bagi kemajuan umat islam sehingga ketika organisasi ini mengelola lembaga MAMIYAI (masyarakat miskin yatim Al-Ittihadiyah) mereka juga membangun pendidikan untuk mendidik anak-anak yatim dan miskin agar dapat menempuh pendidikan. Organisasi Al Ittihadiyah juga berusaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan agama maupun lembaga pendidikan umum, dilokasi lainnya yang dianggap strategis, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menciptakan putra/I muslim agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia dan akhirat.
- b) Bertujuan 'ubudiyah', yakni agar putra/I muslim memperhambakan dirinya kepada Allah swt.
- c) Menjadikan putra/I muslim dan menjadi manusia-manusia yang berakhlaq mulia.

Berdasarkan tujuan di atas, maka dalam persepektif Al-Ittihadiyah, pendidikan Islam harus mempersatukan tiga aspek

utama yang disebut sebagai tiga serangkai, yaitu ilmu, iman, dan amal guna membentuk manusia agar menjadi umat yang berilmu, beriman, dan beramal yang dihiasi dengan akhlak budi pekerti yang luhur.

Untuk mencapai hal tersebut, Al-Ittihadiyah menerapkan dwi sistem dalam pelaksanaan pendidikannya dengan membangun dan mengembangkan sekaligus sistem pendidikan madrasah dan persekolahan. Untuk mengorganisir dan memajukan kedua sistem kelembagaan pendidikan tersebut, Al-Ittihadiyah membentuk badan otonom yang disebut Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihadiyah.

2. Ciri khas lembaga pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah

Organisasi Al-Ittihadiyah khususnya di kota Medan adalah adanya keseimbangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Organisasi Al-Ittihadiyah tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan agama saja atau lembaga pendidikan umum saja. Kedua pendidikan ini didirikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan perkembangan zaman. Pendirian dua lembaga yang bernaung di kementerian agama dan Kemendikbud sama-sama dikelola organisasi sejalan dengan perkembangan sekolah dan madrasah yang mendapat tempat dipemerintahan dengan status yang sama. Namun Baik pendidikan umum dan madrasah tidak memiliki ciri sebagai pendidikan yang didirikan oleh organisasi keislaman, sekolah dan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Ittihadiyah memandang bahwa pendidikan sangat penting dan strategis bagi kemajuan umat islam sehingga ketika organisasi ini mengelola lembaga MAHAYATI (masyarakat miskin yatim Al-Ittihadiyah) mereka juga membangun pendidikan untuk mendidik anak-anak yatim dan miskin agar dapat menempuh pendidikan. Organisasi Al Ittihadiyah juga berusaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan agama maupun lembaga pendidikan umum, dilokasi lainnya yang dianggap strategis dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menetapkan pusat muslim agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia dan akhirat.
- b) Bertujuan 'wakafiyah', yakni agar pusat muslim memperhatikan dirinya kepada Allah swt.
- c) Menjadikan pusat muslim dan menjadi manusia-manusia yang bertaklid mulia.

Berdasarkan tujuan di atas, maka dalam persepektif Al-Ittihadiyah, pendidikan Islam harus mempersiapkan tiga aspek

utama yang disebut sebagai tiga serangkai, yaitu ilmu iman, dan amal guna membentuk manusia agar menjadi umat yang beriman, beramal, dan beramal yang dihiasi dengan akhlak budi pekerti yang luhur.

Untuk mencapai hal tersebut, Al-Ittihadiyah menerapkan dua sistem dalam pelaksanaan pendidikannya dengan membangun dan mengembangkan sekaligus sistem pendidikan madrasah dan persekolahan. Untuk mengorganisir dan memajukan kedua sistem kelengkapan pendidikan tersebut, Al-Ittihadiyah membentuk badan otonom yang disebut Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihadiyah.

## 2. Ciri khas lembaga pendidikan organisasi Al-Ittihadiyah

Organisasi Al-Ittihadiyah khususnya di kota Medan adalah adanya keseimbangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Organisasi Al-Ittihadiyah tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan agama saja atau lembaga pendidikan umum saja. Kedua pendidikan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan perkembangan zaman. Pendirian dua lembaga yang berwujud di Kementerian agama dan Kemendikbud sama-sama dikelola organisasi sejalan dengan perkembangan sekolah dan madrasah yang mendapat tempat dipemerintahan dengan status yang sama. Namun baik pendidikan umum dan madrasah tidak memiliki ciri sebagai pendidikan yang didirikan oleh organisasi keislaman, sekolah dan

madrasah yang ada sekarang ini hanya menjalankan program yang diatur oleh pemerintah tanpa menawarkan keunggulan tertentu.

3. Tantangan yang dihadapi pengurus organisasi Al-Ittihadiyah Kota Medan dalam menjalankan/mengendalikan sekolah-sekolah sangat besar, mengingat selama ini kekolah dan madrasah berjalan sendiri tanpa ada pembinaan dari pengurus lama baik wilayah maupun cabang, sehingga yayasan sekolah/madrasah atau kepala sekolah berjalan sendiri tanpa ada pengawasan dari organisasi. Kondisi ini membuat yayasan atau kepala sekolah menganggap sekolah/madrasah ini milik yayasan atau pribadi yang akan menjadikan sekolah lepas dari organisasi.

## B. Saran-saran

1. Disarankan kepada pengurus organisasi Al-Ittihadiyah baik wilayah maupun cabang untuk melakukan konsolidasi organisasi untuk melakukan inventarisasi lembaga-lembaga pendidikan yang masih beroperasi. Pengurus organisasi juga harus melakukan pendekatan kepada yayasan dan kepala sekolah agar dapat menjalankan sekolah/madrasah tetap dibawah bendera organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan melakukan silaturahmi kepada pihak yayasan dan kepala sekolah agar terjalin kebersamaan dalam menjalankan organisasi dan sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan utama pendirian organisasi dan pendidikan.

madrasah yang ada sekarang ini hanya menjalankan program yang diatur oleh pemerintah tanpa menawarkan keunggulan tertentu.

3. Tantangan yang dihadapi pengurus organisasi Al-Ittihadiyah Kota Medan dalam menjalankan/mengendalikan sekolah-sekolah sangat besar, mengingat selama ini sekolah dan madrasah berjalan sendiri tanpa ada pembinaan dari pengurus lama baik wilayah maupun cabang, sehingga Yayasan sekolah/madrasah atau kepala sekolah berjalan sendiri tanpa ada pengawasan dari organisasi. Kondisi ini membuat Yayasan atau kepala sekolah menganggap sekolah/madrasah ini milik Yayasan atau pribadi yang akan menjadikan sekolah lepas dari organisasi.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada pengurus organisasi Al-Ittihadiyah baik wilayah maupun cabang untuk melakukan konsolidasi organisasi untuk melakukan inventarisasi lembaga-lembaga pendidikan yang masih beroperasi. Pengurus organisasi juga harus melakukan pendekatan kepada Yayasan dan kepala sekolah agar dapat menjalankan sekolah/madrasah tetap dibawah bendera organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan melakukan silaturahmi kepada pihak Yayasan dan kepala sekolah agar terjalin kebersamaan dalam menjalankan organisasi dan sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan utama pendidikan organisasi dan pendidikan.

- 2. Pengurus wilayah dan cabang bersama-sama pihak yayasan dan kepala sekolah harus merumuskan kembali ciri khas sekolah/madrasah yang didirikan di bawah organisasi Al - Ittihadiyah dengan menawarkan keunggulan yang spesifik bagi sekolah/madrasah yang dikelola sehingga dapat bersaing dengan sekolah/madrasah lain yang sudah ada.
- 3. Bagi pihak yayasan dan kepala sekolah yang menjalankan pendidikan baik madrasan atau sekolah agar dapat menjalankan madrasah/sekolah sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam menjalankan lembaga pendidikan dibawah bendera organisasi.

Taliban 1913-1941 Al-Ittihadiyah (pp. C.V.O. Conference Al-Ittihadiyah No 1, 11941)

Unggul Perjuangan Pusat Al-Ittihadiyah, Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Ittihadiyah (Jakarta: Sekretariat DPP dan PP Mustashaf Al-Ittihadiyah, 1992).

Goodrey E.W, Soeban, *Psychology of Religion*, (London: B.T. Batsford, 1973).

H. Mahmud Abu Bakar, "Al-Ittihadiyah 'Abad' dalam Bacharrah", (Jakarta: Al-Ittihadiyah, 1960).

Arker et al., *Pergerakan Ulama' Al-Ittihadiyah* (Medan: Panitia Pusat Kongres ke X al-Ittihadiyah, 1960).

B. Mahmud Abu Bakar, "Muktamar ke-XII Al-Ittihadiyah dalam Makhla' Asjad et al., *Huku Muktamar Al-Ittihadiyah ke-XII* (Kedondong: Sekretariat Panitia Muktamar, 1968).

2. Pengurus wilayah dan cabang bersama-sama pihak yayasan dan kepala sekolah harus memunaskan kembali ciri khas sekolah/madrasah yang didirikan di bawah organisasi Al-Ittihadiyah dengan menawarkan keunggulan yang spesifik bagi sekolah/madrasah yang dikelola sehingga dapat bersaing dengan sekolah/madrasah lain yang sudah ada.
3. Bagi pihak yayasan dan kepala sekolah yang menjalankan pendidikan baik madrasah atau sekolah agar dapat menjalankan madrasah/sekolah sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam menjalankan lembaga pendidikan dibawah bendera organisasi.

## DAFTAR BACAAN

- Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Rajawali Press, 2001)
- Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Bachroem Azhar et. al., *Peringatan Ulang Tahun ¼ Abad al-Ittihadiyah*, (Medan: Panitia Besar Kongres ke X al-Ittihadiyah, 1960).
- C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah, 'Azas, toejoean, oesaha, dan organisatie Al-Ittihadiyah' dalam *Conferentie Jubileum 6 Tahoen 1935-1941 Al-Ittihadiyah* (ttp: C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah Ke 1, 11941).
- Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah, *Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Ittihadiyah* (Jakarta: Sekretariat DPP dan PP Muslimat Al-Ittihadiyah, 1999).
- Geoffrey E.W. Scobie, *Psychology of Religion*, (London: B.T. Batsford, 1975).
- H. Mahmud Abu Bakar, "Al-Ittihadiyah ¼ Abad" dalam Bachroem Azhar et. al., *Peringatan Ulang Tahun ¼ Abad al-Ittihadiyah*, (Medan: Panitia Besar Kongres ke X al-Ittihadiyah, 1960).
- H. Mahmud Abu Bakar, 'Mukhtamar ke-XII Al-Ittihadiyah' dalam Muchlis Arsjad et. al., *Buku Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-XII* (Bandung: Seksi publikasi Panitia Mukhtamar, 1968).

DAFTAR BACAAN

Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Rajawali Press, 2001)

Ali Imron, *Kejayaan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Bachrom Azhar et. al., *Peringatan Ulang Tahun 100 al-Ittihadiyah*, (Medan: Panitia Besar Kongres ke X al-Ittihadiyah, 1990).

C.V.O. Conference Al-Ittihadiyah, 'Azas, tujuan, sejarah dan organisasi Al-Ittihadiyah' dalam *Conference Jubileum 6 Tahun 1935-1941 Al-Ittihadiyah* (tp: C.V.O. Conference Al-Ittihadiyah Ke 1, 1941).

Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah, *Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Ittihadiyah* (Jakarta: Sekretariat DPP dan PP Muslimat Al-Ittihadiyah, 1999).

Geoffrey E.W. Scobie, *Psychology of Religion*, (London: B.T. Batsford, 1973).

H. Mahmud Abu Bakar, "Al-Ittihadiyah 100 Tahun" dalam *Bachrom Azhar et. al., Peringatan Ulang Tahun 100 al-Ittihadiyah*, (Medan: Panitia Besar Kongres ke X al-Ittihadiyah, 1990).

H. Mahmud Abu Bakar, "Muktamar ke-XII Al-Ittihadiyah" dalam *Muchlis Arsyad et. al., Buku Muktamar Al-Ittihadiyah ke-XII* (Bandung: Seksi Publikasi Panitia Muktamar, 1988).

Irfan Safrudin (et all), *Ulama-ulama Perintis*, (Bandung: MUI, 2008).

J.M. Yinger, *Religion, Society and the Individual*, (New York: Macmillan, 1957).

K. H. A. Fuad Said, "Sejarah Singkat al-Ittihadiyah dan Sambutan yang Disampaikan dalam Acara Pembukaan Muktamar ke XVI dan HUT ke 64" dalam *Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga al-Ittihadiyah*, (Jakarta: sekretariat DPP al-Ittihadiyah, 1999).

K.H. Sajuhti Noor, 'Dakwah dan Pendidikan Islam' dalam *Buku Mukhamar Al-Ittihadiyah ke XII* (Badung: Seksi Publikasi Panitia Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-13, 1968).

Mirza Nasution dan Iman Pasu Purba., *Jaminan Kehidupan Beragama dalam Konstitusi*, (Jakarta:Sofmedia,2013).

Novri Susan.,*Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta:Kencana,2009).

Robert H. Thoules, *An Introduction to Psychology of Religion*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

Sam M. Chan dan TutiT. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

SoerjonoSoekanto.,*TeoriSosiologi Tentang Perubahan Social*. (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983).

Tobroni.,*RelasiKemanusiaan dalam Keberagamaan*,(Bandung:Putra Darwati, Bandung,2012).

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*  
 Yesmil Anwar dan Adang., *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008).  
 Zakiyuddin Baidhawi., *Kredo Kebebasan Bergama*. (Jakarta: PSAP, 2006).

Daswati, Bandung 2012).  
 Toponi., *Relasi Kemasyarakatan dalam Keberagaman* (Bandung: Putra  
 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).  
 Soejono Soekanto., *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*  
 2001).  
 Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
 Siti Irene Astuti Dwiningrum., *Desentralisasi dan Partisipasi*  
 Daerah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).  
 Sam M. Chan dan Tutit. Sam., *Kejadian Pendidikan Era Otonomi*  
 (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).  
 Robert H. Thoules., *An Introduction to Psychology of Religion*.  
 (Jakarta: Kencaan, 2009).  
 Novi Susana., *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*,  
 dalam *Konstitusi* (Jakarta: Sofmedia, 2013).  
 Mira Nasution dan Imran Pasa Pasha., *Jaminan Kepiduan Bergama*  
 Panitia Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-13, 1988).  
 Mukhamar Al-Ittihadiyah ke XII (Bandung: Seksi Publikasi  
 K.H. Saifuddin Noor., *Dakwah dan Pendidikan Islam*, dalam *Buku*  
 DPP al-Ittihadiyah, 1999).  
 Anggota Rumanh Tanga al-Ittihadiyah, (Jakarta: sekretariat  
 XVI dan HUT ke 64" dalam *Pedoman Anggaran Dasar dan*  
 yang Disampaikan dalam Acara Pembukaan Mukhtamar ke  
 K. H. A. Fuad Sa'id., "Sejarah Singkat al-Ittihadiyah dan Sambutan

